



**STUDI PERBANDINGAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA
DI INDONESIA DENGAN MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA
(Studi Kasus di PA Tanjung Karang dan MS Kelantan Tahun 2013-2016)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas
Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

TENGGU MUHAMAD ROSFAIZAL

NPM 1321010077

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Program Studi Akhwal Al Syakhsiyyah

Pembimbing I : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439H/ 2017M**

**STUDI PERBANDINGAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA
DI INDONESIA DENGAN MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA
(Studi Kasus di PA Tanjung Karang dan MS Kelantan tahun 2013-2016)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Pembimbing I : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439H/ 2017M**

ABSTRAK

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Ada beberapa alasan perceraian yang diatur oleh Hukum Islam di Pengadilan Agama Tanjung Karang, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Perundangan Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, diantaranya, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sebagai alasan perceraian. Manakala yang di atur di Mahkamah Syariah Kelantan, Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Bahagian V Pembubaran perkawinan. Hal ini menyebabkan terjadinya multitafsir, karena cakupannya terlalu luas, sehingga banyak hal dijadikan sebagai alasan perselisihan dan pertengkaran untuk bercerai, dan nantinya dapat menjadi salah satu pendorong terjadinya perceraian yang terlalu mudah dilakukan di kehidupan masyarakat. Undang-undang Perkawinan tidak dapat menentukan batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian, karena bercerai merupakan hak asasi manusia.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan? (2) Bagaimanakah prosedur perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan, (2) Untuk mengetahui prosedur perceraian pada Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif dimana data primernya merupakan data lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Data sekundernya berupa buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data menggunakan metode berfikir deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari suatu masalah berdasarkan pada hal-hal atau kejadian-kejadian yang umum kepada suatu kesimpulan yang khusus.

Hasil dari penelitian, penulis menemukan bahwa perbandingan antara Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung Indonesia dengan Mahkamah Syariah Kelantan Malaysia, yang mengenai prosedur dan faktor perceraian. Dari segi prosedur perceraian tidak terlalu berbeda, malah pada proses persidangan perceraian yang menunjukkan tempoh masa yang berbeda. Selain itu juga, pranar Hakim dalam persidangan pada kedua pengadilan juga terlihat berbeda. Manakala faktor perceraian pula, menunjukkan tingginya tingkat perceraian yang terjadi di kedua pengadilan ini, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang menjadi faktor utama ialah; akibat ketidakharmonian, tidak ada tanggungjawab, dan masalah ekonomi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Tlp. (0721)703278

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah memperbaiki dan memberi masukan dan arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : TENGKU MUHAMAD ROSFAIZAL
NPM : 1321010077
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : STUDI PERBANDINGAN PERCERAIAN PADA
PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA DENGAN
MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA (Studi Kasus di
PA Tanjung Karang dan MS Kelantan Tahun 2013-2016)

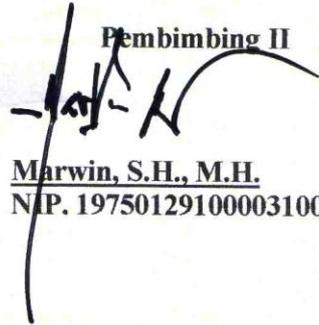
MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

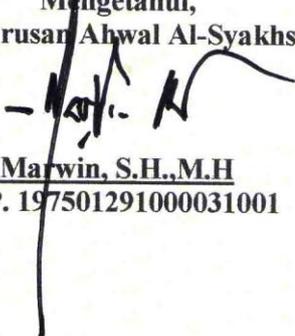
Pembimbing I


Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
NIP. 197012282000031002

Pembimbing II


Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501291000031001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah**


Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501291000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

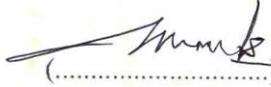
Alamat : Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Tlp. (0721)703278

PENGESAHAN

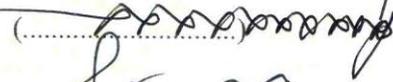
Skripsi dengan judul **STUDI PERBANDINGAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA DENGAN MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA (Studi Kasus di PA Tanjung Karang dan MS Kelantan Tahun 2013-2016)**, disusun oleh **Tengku Muhamad Rosfaizal Bin Tuan Mohd Faisool NPM 1321010077** Program Studi **Ahwal Al-Syakhsiyah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I


(.....)

Sekretaris : Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.


(.....)

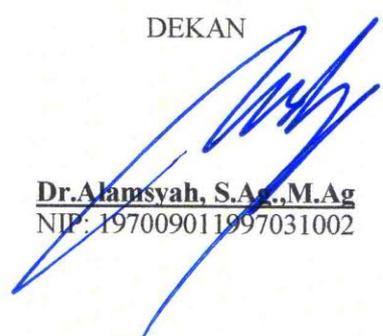
Penguji I : Dr. Jayusman, M.Ag.


(.....)

Penguji II : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.M.H.


(.....)

DEKAN


Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP: 197009011997031002

MOTTO

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹



¹ Surah An-Nisa' ayat 19, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Al-Quran dan terjemahannya*, Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd., Kuala Lumpur. 2007.

PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT, dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafa'atnya. Ucapan terima kasihku kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

Karya tulis ini dipersembahkan pada orang-orang yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan karya ini, di antaranya:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Tuan Mohd Faisool dan Ibu Tengku Roslizam yang selalu memberikan motivasi yang sangat besar untuk menggapai keberhasilanku dan dengan sabar melimpahi aku dengan do'a dan kasih sayang.
2. Adik dan kakakku tersayang Tengku Rosdin, Tengku Fairos Syakila, dan Tengku Muhamad Rosfai Atinor yang selalu menantikan keberhasilanku.
3. Keluarga besarku yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan untukku.
4. Yang kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Tengku Muhamah Rosfaizal dilahirkan di Kelantan Malaysia, pada tanggal 12 Juli 1993, anak ketiga dari empat saudara, dari pasangan Bapak Tuan Mohd Faisool dan Ibu Tengku Roslizam. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

- TK Kem Sungai Ara Pulau Pinang Malaysia lulus pada tahun 2000.
- Sekolah Dasar Negeri Kelantan Pasir Mas Mekasa (SKM), Malaysia lulus pada tahun 2006.
- Sekolah Menengah Ugama Arab (SMU(A) Rahmaniah Paloh Tanah Merah Kelantan Malaysia lulus pada tahun 2011.

Kemudian penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dari tahun 2013 hingga saat ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Studi Perbandingan Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia (Studi Kasus Di Pa Tanjung Karang Dan Ms Kelantan Tahun 2013-2016)”, dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

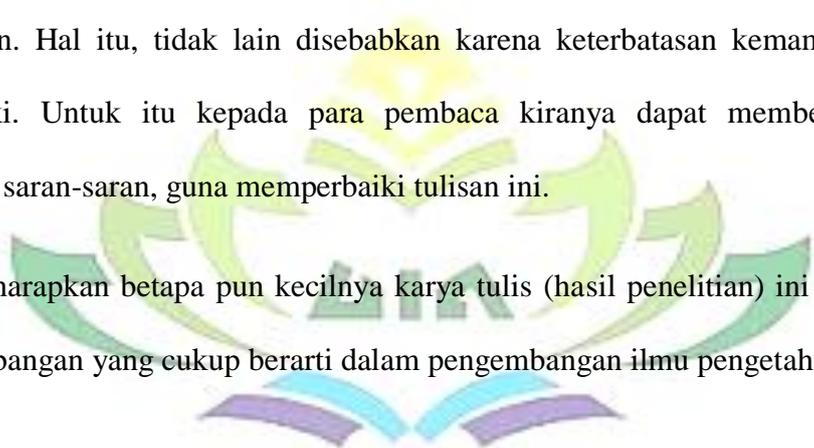
Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S-1), pada Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) dalam bidang ilmu Syari’ah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor IAIN Raden Intan Lampung;
2. Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung;
3. Marwin, S.H., M.H., selaku ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung;
4. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H., selaku pembimbing I, dan Marwin, S.H., M.H., selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini;

5. Bapak dan Ibu Dosen serta para staf/karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Bapak, Ibu, Kakak dan Adik, serta teman-teman dekat, yang senantiasa mendo'akan, membantu, serta memberikan dukungan dalam upaya menyelesaikan skripsi ini;
7. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2013 khususnya keluarga besar HIMPAS (Himpunan Mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah).

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu, tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna memperbaiki tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapa pun kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Bandar Lampung, 2017

Penulis,

Tengku Mohamad Rosfaizal

NPM 1321010077

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
F. Metode Penelitian	13
BAB II PERCERAIAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian Perceraian/Talak	17
B. Dasar Hukum Perceraian/Talak	20
C. Macam-Macam Talak	27
BAB III LAPORAN PENELITIAN	
A. PENGADILAN AGAMA INDONESIA	
1. Sejarah, Stuktur Organisasi dan Kewenangan PA Tanjung Karang ..	40
2. Alasan dan faktor penyebab perceraian	54
3. Prosedur perceraian	68
B. MAHKAMAH SYARIAH KELANTAN MALAYSIA	
1. Sejarah, Stuktur Organisasi dan Kewenangan MS Kelantan	68
2. Alasan dan faktor penyebab perceraian	79
3. Prosedur perceraian	84

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan 90
- B. Prosedur perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan Malaysia94

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan99
- B. Saran101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Judul skripsi ini adalah: **“STUDI PERBANDINGAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA DENGAN MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA”** yaitu sebagai studi kasus di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan pada tahun 2013 hingga 2016. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan yaitu sudut banding atau perbedaan diantara dua mahkamah dari negara yang berbeda.
2. Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan suami isteri. Perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai faktor, antara lain kerana terjadinya yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain². Perceraian bisa berlaku diluar pengadilan dan di pengadilan, namun siapa saja boleh mengajukan perceraian baik suami sebagai cerai talak maupun isteri sebagai cerai gugat.

² A. Tihami, Sohari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta, Rajawali Pers, 2010. hlm. 229 .

3. Pengadilan Agama di Indonesia adalah proses mengadili, keputusan hakim, dewan atau majelis yang mengadili perkara, sidang hakim ketika mengadili perkara, rumah atau bangunan tempat mangadili perkara. Pengadilan adalah Lembaga badannya, dalam istilah Inggeris disebut court dan cechbank dalam bahasa Belanda yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.³
4. Mahkamah Syariah Kelantan adalah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang islam bagi kesalahan dalam permasalahan agama mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan untuknya. Mahkamah di Malaysia terbahagi kepada dua iaitu Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Kedua-dua mahkamah ini mempunyai bidang kuasa yang tersendiri. Bidang kuasa Mahkamah Syariah terbatas kepada perkara-perkara yang bersangkutan dengan agama islam. Mahkamah ini membicarakan perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, nafkah, hak penjagaan anak dan perkara-perkara yang berkaitan dengan harta menurut undang-undang atau hukum agama Islam.⁴

Adapun yang dimaksudkan dengan judul di atas adalah berkenaan prosedur perceraian dan faktor perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan, adalah untuk melihat perbandingan prosedur dan faktor perceraian yang berlaku di kedua pengadilan ini.

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT AsdiMahasatya, Jakarta, 2007., hlm. 349.

⁴ Andek Masnah Andek Kelawa, *Kepimpinan Wanita Dalam Islam (Kedudukannya Dalam Syariah)*, Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, 1999. Hlm. 145.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan untuk memilih judul tersebut ialah:

1. Secara obyektif, mahkamah atau pengadilan merupakan tempat persidangan dalam menyelesaikan masalah, namun untuk perbandingan diantara Mahkamah Syariah Kelantan Malaysia dan Pengadilan Agama Tanjung Karang Indonesia, menjadi satu persoalan yang penting untuk mengetahui lebih jelas tentang peraturan-peraturan mahkamah atau pengadilan tersebut dan mengenai faktor-faktor yang mendorong ke arah permasalahan.
2. Secara subyektif, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni di Fakultas Syariah jurusan *Ahwal Al-Syakhsiyah*, dan tersedianya literatur yang ada untuk membahas penelitian dalam hal tersebut.

C. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan perkawinan, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, di mana suami isteri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Selain itu, nikah juga merupakan pencegah penyaluran kebutuhan seks pada jalan yang tidak dikehendaki agama. Nikah mengandung arti larangan menyalurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama atau menyimpang. Itulah sebabnya agama melarang pergaulan bebas, dansa-dansi, gambar-gambar porno serta cara lain yang dapat

menenggelamkan nafsu berahi atau kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama.⁵

Hal ini berarti bahwa perkawinan itu harus langgeng dan kekal abadi kerana suami isteri bukan saja berjanji antara mereka berdua sebagai suami isteri, tetapi disaksikan oleh keluarga masing-masing, disamping itu disaksiakan Allah Subhanahu Wata'ala. Sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Quran surah An-Nisaa' ayat : 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Dalam Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Dari sebuah rumah tangga, segala persoalan kehidupan manusia timbul. Adalah merupakan kehendak Tuhan untuk memulai adanya kehidupan manusia di atas muka bumi melalui satu keluarga yang berasal dari seorang diri, yaitu Adam. Dari Adam, diciptakan isterinya Hawa, maka terbentuklah suatu rumah tangga yang beraggotakan dua orang (suami isteri). Dan dari keduanya timbul beberapa keluarga lain, sehingga terbentuklah suatu masyarakat yang akan meneruskan kelangsungan hidup

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 9*, Bandung: Alma'arif. 1997., hlm. 86.

manusia di atas bumi. Bersamaan dengan itu telah ditetapkan pula aturan bermasyarakat yang harus dipatuhi oleh setiap orang.⁶

Maka dari itu perkawinan adalah salah satu yang dapat menjauhkan diri kita dari perbuatan zina yang amat di benci oleh Allah. Sebagaimana yang dapat kita yakinkan bahawa Allah berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' :32)⁷

Adapun disini perkawinan adalah suatu perbuatan yang amat baik dan termasuk pelaksanaan agama, namun disetiap perkawinan itu dapat diputuskan dan berakhir kerana beberapa hal, yaitu kerana terjadinya talak atau perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau kerana perceraian yang terjadi diantara keduanya, atau kerana sebab-sebab lain.

Sesungguhnya Islam telah memilih sistem talak ketika terjadi pertengkarannya rumahtangga, kehidupan suami isteri tidak lagi mendatangkan kebahagiaan dan tidak berguna lagi nasihat dan perdamaian, bahkan ikatan suami isteri ketika itu dilaksanakan gambar yang tidak mempunyai nyawa. Jikalau diteruskan kehidupan dalam keadaan demikian rupa berarti kita telah menjatuhkan hukuman penjara buat selama-lamanya keatas salah seorang pasangannya. Ini suatu kezaliman yang ditolak oleh *ruh* keadilan bahkan kadangkala boleh jadi ia sebagai satu cara

⁶ Abduttawab Haikal, *Rahsia Perkahwinan Rasulullah SAW*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993, hlm. 6.

⁷ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Al-Quran dan Terjemahannya*, Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd., Kuala Lumpur. 2007, hlm. 282.

untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dalam usaha melepaskan daripada kesangsaraan yang tidak boleh keluar darinya.⁸

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Nisa' :130).⁹

Dan dari itu, proses mengenai pencerain dalam perkawinan yang akan penulis bahaskan disini dari dua mahkamah dan negara yaitu Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Kelantan Malaysia. Akan tetapi pada khususnya penulis ingin membahaskan perbandingan pencerai di antara dua mahkamah tersebut. Walaupun perbuatan pencerai ini adalah halal disisi Allah, akan tetapi ia juga suatu perkara yang tidak disukai Allah.

Rasulullah SAW bersabda:

ابغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya: "perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak."

Hadis ini menjadi dalil bahwa di antara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak.¹⁰

Namun begitu permasalahan diantara suatu pasangan sering berlaku dikalangan

⁸ Mohd Salleh Ahmad, *Perkahwinan Dan Perceraian Dalam Islam*, Nazrah Enterprise, Cetakan Kedua, Selangor Darul Ehsan, 2010, hlm. 121.

⁹ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 99

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, Ed.1., Cet. 4., hlm. 212.

masyarakat kini. Dari itu timbulnya perceraian dan perpisahan antara suami isteri dalam pelbagai permasalahan. Maka di sini setiap negara mempunyai proses atau cara yang tersendiri dalam menyelesaikan perceraian tersebut.

Secara umumnya, mahkamah di Indonesia yang biasa dipanggil sebagai peradilan. Negara Indonesia mempunyai pelbagai peradilan, ini kerana Indonesia dikenal sebagai salah satu negara hukum. Dan segala kedudukan atau kekuasaan badan peradilan ini adalah dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kedudukan dan kewenangan masing-masing peradilan, dibawah Mahkamah Agung yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Peradilan Agama adalah perkara yang ia boleh mengadilinya, selalunya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata “peradilan islam” dengan kata-kata di Indonesia adalah kerana jenis perkara yang ia boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara Universal. Tegasnya, Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.¹¹

Pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut menggambarkan seolah-olah Peradilan Agama sebagai Peradilan Islam yang bersifat universal. Peradilan Agama adalah Peradilan Islam kerana jenis-jenis perkara yang menjadi kompetensinya adalah jenis perkara menurut agama islam, namun Peradilan Agama adalah Peradilan Islam yang bersifat limitatif sebagaimana ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

¹¹ Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Keempat, 1995, hlm. 5

1989, sehingga kompetensi Peradilan Agama tidak mencakup kompetensi menurut peradilan Islam secara universal.¹²

Adapun kewenangan Peradilan Agama mengenai perkara tertentu tersebut dalam Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 jo UU No.3 tahun 2006 dibidang-bidang (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e); (f) zakat; (g) infaq; (h) sodaqoh; dan (i) ekonomi syariah. Di samping itu pengadilan agama memberikan istbat yaitu kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah (pada 49-50A).¹³

Pengaturan mengenai perjatuhan talak diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, selanjutnya ditulis Undang-Undang Peradilan Agama.¹⁴ Kedua pasal tersebut mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁵

Adapun suatu alasan yang dapat diajukan dalam penggugatan cerai tersebut adalah mempunyai beberapa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang di Pengadilan Agama Indonesia. Di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

¹² Musthofa, *kepaniteraan peradilan agama*, Jakarta. Kencana, 2005., Hlm. 7.

¹³ Badruzzaman siddik, *Perkembangan Peradilan Di Indonesia*, Percetakan CV. Ardi, Fakultas Syari'ah IAIN Radin Intan Lampung, 2015. Hlm. 5.

¹⁴ Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkahwinan Di Indonesia*, Bulan Bintang Jakarta, Cetakan Kedua, 1978, hlm. 59.

¹⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pt Pradnya Paramita, Jakarta, 1914, hlm. 458.

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi kerana alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau kerana hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkahwinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁶

Manakala Peradilan Agama di Malaysia disebut Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ialah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan dalam permasalahan agama mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan untuknya. Mahkamah di Malaysia terbahagi kepada dua iaitu Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Kedua-dua

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkahwinan Islam dan UUP* (Undang-Undang Nombor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Yogyakarta, 1982.

mahkamah ini mempunyai bidang kuasa yang tersendiri. Bidang kuasa Mahkamah Syariah terbatas kepada perkara-perkara yang bersangkutan dengan agama Islam. Mahkamah ini membicarakan perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, nafkah, hak penjagaan anak dan perkara-perkara yang berkaitan dengan harta menurut undang-undang atau hukum agama Islam.¹⁷ Permasalahan tersebut diketogerikan di dalam Kes (perkara) di bawah Seksyen Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam No. 6/2002 Negeri Kelantan.

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan mula ditubuhkan berdasarkan Seksyen 8(1), (2), (3) dan (4) Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Kelantan 1982 (Pindaan 1998). Penubuhannya berkuatkuasa pada 16hb Julai 1998 mengikut Warta Kerajaan Negeri Kelantan Jld.51 Nombor 7 yang bertarikh 26hb Mac 1998. Sebelum itu, Mahkamah-mahkamah Syariah Negeri Kelantan dibawah Pejabat Qadhi Besar Kelantan dan diketuai Qadhi Besar yang kemudian diubah kepada Ketua Hakim Syarie mulai pada 16hb Ogos 1998.¹⁸

Seterusnya bagi alasan yang berlaku pada undang-undang di Mahkamah Syariah Kelantan yaitu didalam Enakman 6 Tahun 2002 Enakman Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Bahagian V - Pembubaran Perkawinan :

1. Seksyen 45. Takat kuasa untuk membuat sesuatu perintah.
2. Seksyen 46. Pertukaran agama
3. Seksyen 47. Perceraian dengan talak atau dengan perintah.
4. Seksyen 48. Timbangtara oleh Hakam.

¹⁷ Andek Masnah Andek Kelawa, *loc.cit*, Hlm. 145.

¹⁸ Abdul Monir Yaacob. 2015. *Kehakiman Islam dan mahkamah Syariah*. Selangor, Malaysia: Universiti Islam Malaysia

5. Seksyen 49. Perceraian khulu' atau cerai tebus talak.
6. Seksyen 50. Perceraian dibawah ta'liq atau janji.
7. Seksyen 51. Perceraian dengan li'an.
8. Seksyen 52. Hidup semula sebagai suami isteri atau ruju'.
9. Seksyen 53. Perintah untuk membubarkan perkawinan atau untuk fasakh.
10. Seksyen 54. Aggapan Mati.
11. Seksyen 55. Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan.
12. Seksyen 56. Pendaftaran perceraian.
13. Seksyen 57. Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah.
14. Seksyen 58. Mutah atau pemberian suguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut.
15. Seksyen 59. Hak terhadap mas kawin dan sebagainya tidak akan di sentuh.

Dengan apa yang dapat penulis paparkan diantara kedua mahkamah tersebut maka dapat dilihat bahawasanya permasalahan yang dapat diadili pada kedua mahkamah ini hampir sama permasalahannya. Akan tetapi kekuasaan pada Peradilan Agama Indonesia masih tergantung pada Mahkamah Agung, manakala Mahkamah Syariah kekuasaannya tidak tergantung pada Mahkamah lain dan tetapi kekuasaannya adalah terbatas kepada perkara-perkara yang bersangkutan dengan agama Islam.¹⁹

Walaupun permasalahan yang diadili kedua mahkamah tersebut hampir sama diantara kedua mahkamah ini, apakah faktor yang mendorong permasalahan yang

¹⁹ Pembubaran Perkahwinan “ENAKMEN 6 TAHUN 2002 ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002” (On-line), tersedia di : http://www2.esyariah.gov.my/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/3865cdb2483068f748257125002aa741?OpenDocument, (30 Agustus 2004).

diadili kedua mahkamah ini sama dan apakah proses atau prosedur mengenai perceraian di antara kedua mahkamah ini juga sama? Dengan itu, penulis akan membahaskan mengenai persoalan ini agar kita sebagai manusia yang berbeda negara dan tetap masih satu agama, mengetahui hal tersebut diantara satu sama lain. Selain itu juga dari penelitian ini dapat kita mengetahui kehidupan dan kefahaman dalam hukum berkeluarga bagi setiap rakyat diantara kedua negara ini mempunyai persamaan atau pun tidak. Sebagaimana pepatah mengatakan agar kita tidak menjadi seperti seekor katak (kodok) di bawah tempurung, yaitu ibarat manusia yang tidak tahu akan perkembangan dunia dengan lebih meluas.

Jadi perkara ini menimbulkan persoalan mengenai perbandingannya. Selain itu juga dari penulisan ini dapat kita mengetahui apakah faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam kehidupan rumahtangga dan bagaimanakah prosidur perceraian diantara kedua buah negara yaitu Indoneisa dan Malaysia. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “Studi Perbandingan Perceraian Pada Pengadilan Agama di Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia (Studi Kasus di PA Tanjung Karang dan MS Kelantan Tahun 2013-2016)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah faktor-faktor penyebab perceraian di Peradilan Agama Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan?

2. Bagaimanakah prosedur perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan?

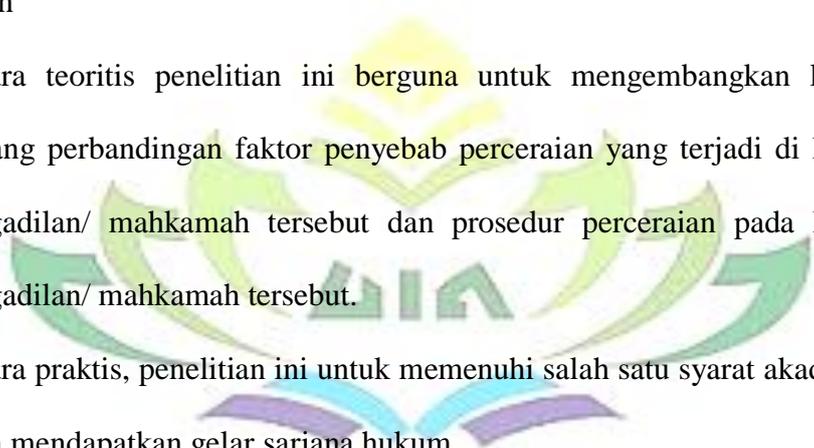
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kelantan Malaysia.
- b. Untuk mengetahui prosedur perceraian pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kelantan Malaysia.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan kajian tentang perbandingan faktor penyebab perceraian yang terjadi di kedua pengadilan/ mahkamah tersebut dan prosedur perceraian pada kedua pengadilan/ mahkamah tersebut.
- b. Secara praktis, penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna mendapatkan gelar sarjana hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).²⁰ Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Pengadilan Agama Tanjung Karang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kelantan di Malaysia.

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 81

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *normatif- empiris*, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum normatif dan terkait dengan hukum empiris. Hukum normatif yang dimaksudkan adalah hukum positif tertulis yang bersumber dari kodifikasi atau undang-undang.²¹

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab fiqh, buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Interview

Penelitian lapangan ini penulis mengambil beberapa data dengan melalui wawancara. Yaitu interview merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²²

b. Dokumentasi

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 131.

²² Suharsini Arti Kunto, *Prosidur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.126.

Yaitu suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya.²³ Metode digunakan khususnya dalam memperoleh data tentang demografis dan geografis di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan.

4. Metode Pengolahan Data

i. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji. Tujuan daripada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.²⁴

ii. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Buku-buku literatur, fiqh Islam, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).

iii. Rekontruksi Data (*Reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

²³ Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi II, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 202

²⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Cetakan Ketiga Belas, Bumi Aksara, Jakarta, 2013. hlm. 153.

iv. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁵

5. Metode Analisa Data

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis sebagai berikut:

- a. Metode berfikir deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari suatu masalah berdasarkan pada hal-hal atau kejadian-kejadian yang umum kepada suatu kesimpulan yang khusus.²⁶ Metode ini digunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran yang umum kepada pemikiran yang khusus, yang kemudian dapat memberikan jalan pembuktian menuju suatu kebenaran yang ilmiah.
- b. Metode Induktif yaitu berfikir dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini merupakan kebalikan dari metode deduktif.
- c. Metode komperatif, yaitu yang membandingkan data yang satu dengan data yang lain dan mengambil pendapat yang sesuai kuat dan menggunakan argumentasi.²⁷ Dalam hal ini berusaha membandingkan dari beberapa pendapat kemudian mengambil salah satu tersebut bahkan menggabungkan keduanya apabila sama-sama memiliki dasar yang kuat dan merupakan kesimpulan bagi penulis.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *loc.cit*, hlm. 126.

²⁶ *Ibid.* hlm. 80.

²⁷ *Ibid.* hlm. 103.

BAB II

PERCERAIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perceraian/Talak.

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata *Itlak* “الطلاق” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh kerana itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan kalimat غليظاً ميثاقاً “perjanjian yang kokoh”.²

Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surah an-Nisa’ ayat 21:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

¹ A. Tihami, Sohari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta, Rajawali Pers, 2010. hlm. 229

² Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Cetkan 1, Cv Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 9.

*Artinya: Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*³

Begitu kuatnya dan kokohnya hubungan antara suami isteri, maka tidak sepantasnya apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci oleh Islam, kerana ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri.⁴

Tidak semua orang menjelang pernikahannya sudah tahu betul akan sifat calon pasangan hidupnya. Adanya khitbah pada umunya hanya merupakan penilaian jasmani semata, sehingga tidak aneh jika cacat yang dimiliki oleh suami atau isteri baru diketahui setelah pernikahan. Hal ini kerana hampir tidak ada orang yang secara jujur baru seratus persen menyebut tentang kekurangan dirinya terhadap orang lain, bahkan yang lebih banyak terjadi justeru akan menutupi cacat atau celanya itu. Apalagi kalau sudah timbul rasa cinta yang dilihat hanyalah yang baiknya, kalau mungkin ada pihak lain yang menyebut cacatnya akan diterima sebagai gurauan belaka.

Kenyataan-kenyataan seperti ini sangat mengancam keselamatan pernikahan. Bila talak dibolehkan, hal itu akan membahayakan kedua belah pihak. Lebih berbahaya lagi bila talak dibebaskan begitu saja. Oleh kerana itu, Islam datang dengan masalah talak, sesuai dengan konsep pokok sebagai berikut:

1. Talak tetap ada di tangan suami sebab suami mempunyai sikap rasional, sedangkan isteri bersifat emosional.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mekar Surabaya, 2002, an-Nisa'(4): 21

⁴ Slamet Abidin, Aminuddin, *Op cit.* hlm. 10.

2. Talak dijatuhkan oleh suami atau pihak lain atas nama suami, seperti Pengadilan Agama.
3. Isteri berhak mengajukan talak kepada suami dengan alasan tertentu lewat qadi (Pengadilan Agama).
4. Talak bisa kembali lagi antara kedua suami isteri sesuai dengan ketentuan agama.
5. Bagi mantan isteri ada masa iddah dan memiliki hak menerima mut'ah dan nafkah dari mantan suami.⁵

Oleh kerana itu, apabila terjadinya perselisihan antara suami isteri, sebaiknya bisa diselesaikan hingga tidak terjadinya perceraian. Kerana bagaimanapun, baik suami maupun isteri tidak menginginkan hal itu terjadi. Lebih-lebih sebuah hadis menjelaskan bahwa meski talak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW, bersabda:

عن عبد الله ابن الوليد الوصافي، عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر : قال رسول الله (ص)، أبغض الحلال الى الله الطلاق.

Artinya: "Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW, bersabda : Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak." (H.R Abbu Daud dan Hakim)⁶

⁵Ibid, hlm 16.

⁶ Abdullah Shonhaji dkk, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, CV ASY SYIFA', Semarang, hlm 728.

B. Dasar Hukum Perceraian/Talak.

Hidup dalam hubungan perkahwinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya, melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan Sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan Rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

Meskipun demikian, bila hubungan perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau talak itu ada kalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah, dan kadang-kadang dihukumi sunnah.⁷ Beberapa ayat Al-Qur'an mengantifikasikan kemungkinan terjadinya perceraian itu.

Memang tidak terdapat dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkahwinan ditemukan beberapa ayat yang melakukannya.

1. Al-Qur'an

Walaupun banyak Al-Qur'an yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu isteri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa *iddah*, seperti dalam firman Allah dalam surah at-Thalaq, ayat 1:

⁷ A. Tihami, Sohari Sahrani, *Op cit.* hlm. 249.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ...

Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar.⁸

Surah At-Thalaq, ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسُتْرَضِعْ لَهُ^ط

أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁹

⁸ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Al-Quran dan Terjemahannya*, Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd., Kuala Lumpur. 2007. hlm. 558.

⁹ *Ibid.* hlm. 559.

Firman Allah SWT, Surah Al-Baqarah, ayat 229:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ^{١٠}

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.¹⁰

Firman Allah SWT, Surah Al-Baqarah, ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^{١١} فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ^{١٢} وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.”¹¹

¹⁰ Ibid. hlm. 35

¹¹ Ibid. hlm. 36

2. Al-Hadits

Hadis Nabi SAW:

عن عبید الله ابن الولید الوصافی، عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر : قال رسول الله (ص)، أبغض الحلال إلى الله الطلاق.

Artinya: “Dari Al-Walid Al-Washshafiy, dari Muharib bin Disar, dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah SAW, bersabda : Sesuatu yang halal paling dibenci oleh Allah ialah talak.”¹²

Sabda Rasulullah SAW:

عن المسور بن مخزومة، عن النبي (ص) قال: لا طلاق قبل نكاح. ولا عتق قبل ملك.

*Artinya: Dari al-Miswar makhramah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Tidak ada talak sebelum nikah, dan tidak ada memerdekakan budak sebelum memiliki”.*¹³

Sabda Rasulullah SAW:

عن عائشه أن رسول الله (ص) قالت: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق.

Artinya: “Diangkatkan hukum dari tiga golongan: “Dari orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa(besar), dan orang gila sampai ia berakal atau siuman.”¹⁴

¹² Abdullah Shonhaji ddk. *Op cit.* hlm. 728.

¹³ *Ibid*, hlm 750.

¹⁴ *Ibid*, hlm 747.

Ditilik dari kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada lima:

a. Wajib

Talak wajib, misalnya talak dari hukum perkara *syiqaq*, yakni perselisihan suami isteri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Termasuk talak wajib ialah talak dari orang yang melakukan *ila*, terhadap isterinya setelah lewat waktu empat bulan.¹⁵

b. Makruh

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama' ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat:

Pertama, bahkan talak tersebut haram dilakukan, kerana dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi isterinya, serta tidak mendatangkan manfaat apa pun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghancurkan harta kekayaan tanpa guna.

Kedua, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW ini;

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

*Artinya: "perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian"*¹⁶

¹⁵ A. Tihami, Sohari Sahrani, *Op cit.* hlm. 250

¹⁶ Mu'ammal Hamidy & Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni*, Pt Bina Ilmu, Surabaya, Jilid 3, Cetakan Pertama, 1987, hlm 242.

Talak itu dibenci kerana dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan. Dan kerana tidak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan, sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.¹⁷

c. Mubah

Talak mubah terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya karena isteri sangat jelek, pergaulan jelek, atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak isteri.¹⁸

d. Sunnah

Sunnah yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah keterlaluhan dalam melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan shalat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau isteri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.¹⁹ Sebagaimana yang difirmankan Allah SWA, dalam surah an-Nisa' ayat 19 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.²⁰

¹⁷ *Ibid.* hlm 243

¹⁸ A. Tihami, Sohari Sahrani, *Op cit.* hlm. 250

¹⁹ *Ibid.* hlm 250

²⁰ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Op cit.* hlm. 80.

e. Haram

Haram yaitu talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid. Para ulama' di Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak bid'ah. Talak bid'ah bearti seorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi ia sudah mencampurinya. Maka dengan demikian ia telah berdosa dan talaknya pun diaggap sah.

Disebut bid'ah kerana suami telah yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Di mana Allah telah berfirman dalam surah At-Talak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar.

Talak bid'ah ini jelas bertentangan dengan syarat, yang terdiri dari beberapa macam:

- a. Apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- b. Jika seorang suami menceraikan isterinya ketika dalam keadaan suci namun ia telah menyetubuhi pada masa suci tersebut.

- c. Seorang suami menjatuhkan talak tiga terhadap isterinya dengan satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu. Misalnya dengan mengatakan “kamu telah aku talak, lalu aku talak dengan selanjutnya aku talak”.²¹

C. Macam-macam Talak.

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Talak Raj’i

Talak raj’i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang telah dicampurinya dan masih dalam masa iddah. Dalam kondisi ini, suami berhak merujuknya lagi, baik isteri setuju atau tidak. Jelasnya talak raj’i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya sebagai talak satu atau talak dua. Apabila isteri berstatus iddah talak raj’i, suami boleh rujuk dengan isterinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian dan tanpa mahar baru pula.²²

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah at-Thalak, ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ

اللَّهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

²¹ Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-Kautsar, Jl. Cipinang Muara Raya63, Jakarta, Cetakan Keempat, 2004, hlm 231.

²² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, cetakan Ke3, 2003, hlm 231.

*Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*²³

Dengan demikian jelas bahawa suami boleh merujuk isterinya kembali yang telah ditalak sekali atau dua kali selama mantan isterinya itu masih dalam masa iddah. Oleh kerana itu, apabila isteri telah diceraikan dua kali, kemudian dirujuk atau dinikahi kembali setelah sampai masa iddahnya, sebaiknya ia tidak diceraikan lagi.²⁴

2. Talak Bain

Talak bain adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami isteri. Talak bain ini terbagi menjadi dua bagian:

a. Talak bain sughar, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istreinya itu. Yang termasuk dalam talak bain sughar ialah:

1. Talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang belum terjadinya dukhul (persetubuhan).

2. Khulu'

²³ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Op cit.* hlm. 558.

²⁴ Slamet Abidin, Aminuddin. *Op cit.* hlm 19.

Hukum talak bain sughra:

1. Hilangnya ikatan nikah antara suami dan isteri.
 2. Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk berkhawat (menyendiri berdua-duaan)
 3. Bekas isteri, dalam masa iddah berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.
 4. Rujuk dengan akad dan mahar yang baru.²⁵
- b. Talak bain kubra, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas isteri, walaupun kedua bekas suami isteri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah atau sesudahnya.

Hukum talak bain kubra:

- a. Hilangnya ikatan nikah antara suami dan isteri.
- b. Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk berkhawat (menyendiri berdua-duaan).
- c. Bekas isteri, dalam masa iddah berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.
- d. Suami haram kawin lagi dengan bekas isterinya, kecuali bekas isterinya telah kawin dengan laki-laki lain setelah berlakunya dukhul.

²⁵ Tihami, Sohari Sahrani. *Op cit*, hlm 240.

Allah SWT, berfirman, surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.”²⁶

Maksudnya apabila seorang suami menceraikan isterinya dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dikawini lagi sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain.²⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

²⁶ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Op cit.* hlm. 36.

²⁷ Tihami, Sohari Sahrani. *Op Cit*, hlm 246

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. PENGADILAN AGAMA INDONESIA

1. Sejarah, Stuktur Organisasi dan Kewenangan PA Tanjung Karang

a. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang

Dalam episode sejarah Peradilan Agama di Indonesia berkembang berbagai istilah atau nama Pengadilan Agama, sejalan dengan perkembangan politik hukum yang berkembang saat itu. Beberapa istilah yang di temui dalam perjalanan peradilan agama selain istilah Peradilan Agama itu sendiri, ditemui berbagai kata dan istilah diantaranya, *Peradilan Agama Islam, Mahkamah Syar'iah, Kerapatan Kadhi*. Pada masa penjajahan kolonial Belanda dikenal *Priessterrad, Pengboeloe Gerecht, Godsdiertige Rechtspraak, Raad Agama* serta masa penjajahan Jepang dikenal istilah *Sooryoo Hooiin*.¹

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.²

Peradilan Agama adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Godstientige Rechtspraak*. *Godstientige* bearti ibadah atau agama. *Rechtspraak* bearti peradilan, yaitu daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian hukum yang

¹ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Cet 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 42.

² "Indonesia" (On-line), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama, (8 April 2016)

dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.

Peradilan Agama di Indonesia semakin tegas disebut serta diakui dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebut bahawa; Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan; (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer, dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara.

Istilah Peradilan Agama ini kemudian secara tegas dinyatakan pula dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, “bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.”³

Pengadilan Agama Tanjung Karang ini dibangun Pemerintah melalui Dana Repelita pada tahun 1975/1978 dengan luas 150 m² diatas tanah seluas 400 m². Bangunan yang terletak di jalan Cendana No. 5 Rawa Laut Tanjung Karang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun seterusnya masih berupa BALAI SIDANG karena belum mamenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor.

Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syariah pernah berkantor di kompleks Hotel Negara Tanjung Karang jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke jalan Raden Intan yang sekarang jadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipinpin oleh K. H. Syarkawi,

³ Abdul Halim, *Op cit*, hlm, 43.

Mahkamah Syariah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.

1. Dasar Kebutuhan.

Sebelum bangsa penjajahan Potugis, Inggris dan Belanda datang di bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah lebih dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat. Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landraad, yang mengurus sengketa / perselisihan masyarakat.

Urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau Pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, dimasyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan / hidup.

Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau, ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

3. Dasar Yuridis.

Menyedari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak azasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan :

- a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610)
- b. Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639)

4. Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung.

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 no. 168/1947, yang menginstruksikan Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.

Berdasarkan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Dalam Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenangnya.

Kewewenangannya Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi

- a. Memeriksa perselisihan suami isteri yang beragama Islam, tentang nikah, thalak, rujuk, fasakh, kiswah, dan perceraian karena melanggar taklik talak.
- b. Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusak (waris) yang dilaksanakan secara Islam.
 - Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
 - Mendaftarkan orang-orang yang masuk Islam.
 - Mengurus soal-soal peribadatan.
 - Memberi fakta dalam berbagai soal.

Dasar Hukum yang hanya dari Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memeberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syariah, karena diaggap tidak mempunyai status hukum.

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan ke pusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dengan Surat

tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syariah. Hal yang mengejutkan adalah munculnya Surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor : Y.A.7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung adalah terletak diluar hukum yang berlaku dalam Negara RI”.

Surat Kementerian Kehakiman itu ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Melalui Suratnya tanggal 24 Agustus Tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Landraad Keresidenan Lampung di Tanjung Karang. Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.

Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melapurkan peristiwa kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”. Ketua Mahkamah Syariah Lampung dengan suratnya Nomor: 1147/B/PA, tanggal 7 November 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi

Surat Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama Lampung. Di tengah perjuangan tersebut K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan Ketua kepada Wakil Ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syariah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod dipindah ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta.

Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan Surat sementara dari Kementerian Agama itu, akan tetapi disana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syariah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain :

- a. Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kemeterian Kehakiman dan Kementerian Agama.
- b. Organisasi Jamiatul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 Mei 1954.
- c. Alim Ulama Bukit Tinggi, sebgai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus Salim.

d. Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Syukur Alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan/ survey dari Komisi E Parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status Pengadilan Agama di Sumatera, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (mahkamah Syariah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syariah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di Luar Jawa, Medan dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah keresidenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syariah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu : “Pengadilan Agama? Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodoqah, baitulmal dan lain-lain yang berhubung dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku”.

Perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di Undangkannya UU Nomor 35/ 1999 kemudian digantidengan UU Nomor 4/ 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 ayat (2) menyebutkan: “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Uundnag-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimanapada Bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkunga Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

5. Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang.

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG
YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN PROFESIONAL DALAM
PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN MENUJU SEPREMASI
HUKUM.

Visi tersebut berharap dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun structural serta karyawan-karyawan Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam melaksanakan aktiviti peradilan. Terbangnya suatu proses

penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa. Maka ditetapkan beberapa Misi PA Tanjung Karang untuk mewujudkan Visi tersebut.

v. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang

- a. Mewujudkan Pengadilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.
- b. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peardilan.
- c. Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif.
- d. Meningkatkan Kesedaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.
- e. Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan.
- f. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.

vi. Letak/ kedudukan.

Kantor PA Kelas 1A Tanjung Karang terletak berkedudukan di Kota Bandat Lampung, Ibu Kota Propinsi Lampung (Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, sebagai mana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

vii. Alamat dan Koordinat.

- a. Kantor PA Kelas 1A Tanjung Karang beralamat di jalan Untung Surapati No. 2 Bandar Lampung (35143)
- b. No. Telepon : 0721-708629, 0721-705501, Fax : 0721-787226.
- c. Koordina : Kota Bandar Lampung terletak pada : $5^{\circ} 25^1$ Lintang Selatan, $105^{\circ} 17^1$ Bujur Timur, $25^{\circ} 17^1$ Arah Kiblat (dari Barat ke Utara)

viii. Keadaan Kantor

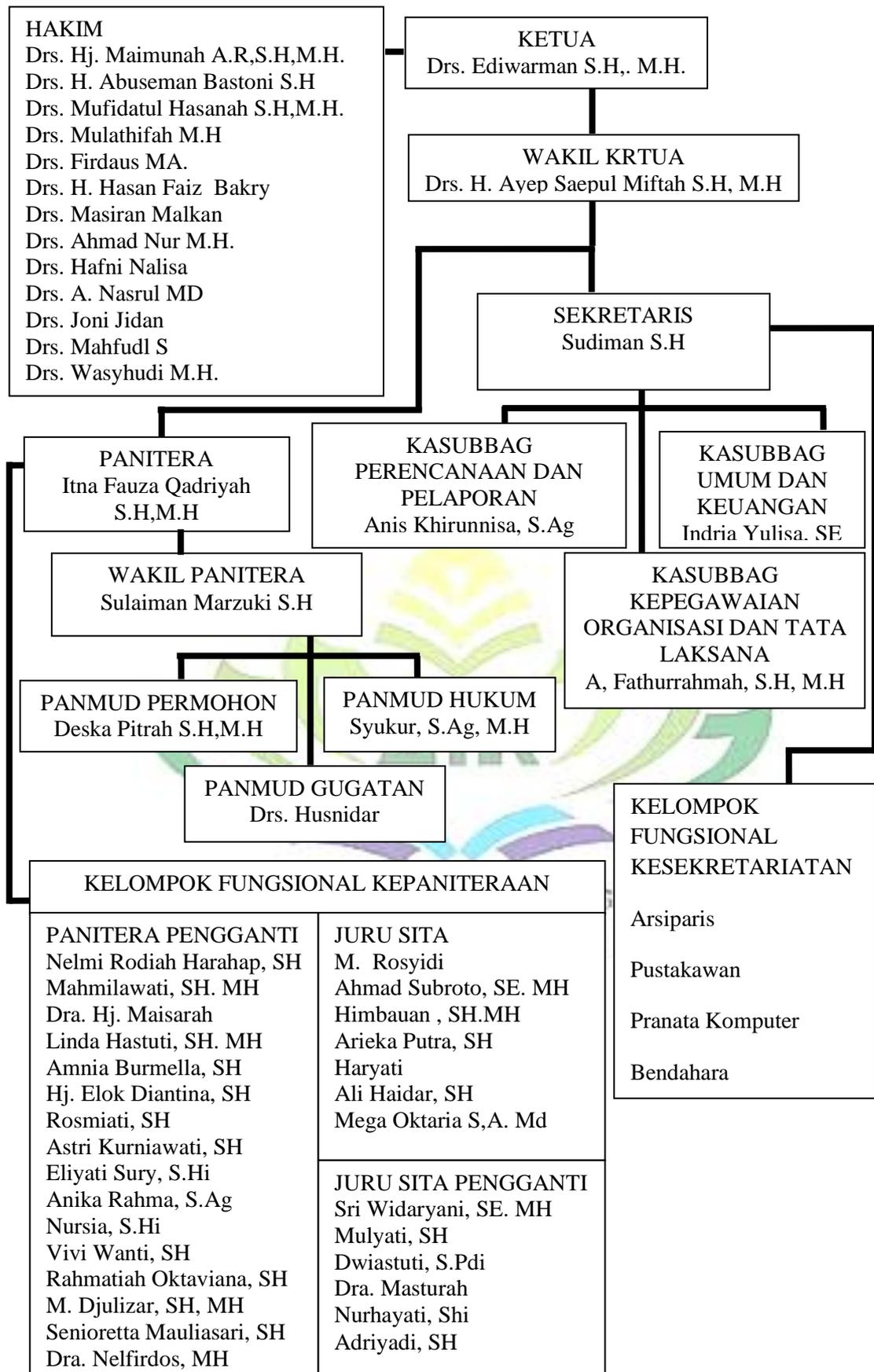
i. Luas Tanah dan Sartafikat Tanah.

Kantor PA Kelas 1A Tanjung Karang terletak di atas tanah seluas 3.680 m². Dibagi dalam dua (2) sartafikat Nomor : 14/L.R Surat Ukur tanggal 3 januari 2004, dengan luas tanah = 680 m², yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Madya Bandar Lampung tanggal 24 Agustus 2004. Sartafikat Nomor : 15/L.R. Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2004, Luas Tanah = 3000 m², yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kota Madya Bandar Lampung tanggal 18 Oktober 2004.

ii. Perasmian Kantor.

Bangunan pertama diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. Mahfudh Arhasy, S.H. atas nama Ketua Mahkamah Agung RI, pada 15 Maret 2005/ 4 Shafar 1426 H. Sedangkan bangunan kedua diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. Ahmad Syarhuddin, S.H., M.H. pada 19 Juni 2006/ 21 Jamadil Awwal 1427 H.

b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang;



c. Kewenangan Peradilan Agama Tanjung Karang

Dari segi kompetensi Peradilan Agama dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan biasanya menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut, sekali gus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/ permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan. Kompetensi berasal dari bahasa Belanda “competentie” yang dapat diterjemahkan dengan kewenangan, kekuasaan.⁴

1. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif artinya kekuasaan pengadilan dalam satu jenis dan satu tingkat, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatnya.⁵ Dapat diartikan *Kompetensi Relatif adalah kekuasaan pengadilan yang dibatasi oleh wilayah hukum*. Masing-masing badan peradilan berwenang mengadili perkara yang menjadi kekuasaannya berdasarkan wilayah hukum.

Tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamandya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengacualian, mungkin lebih atau mungkin kurang. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi (keberatan) tergugat.

⁴ Linda Firdawaty, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Pusikamla Fakultas Usuluddin, IAIN Raden Intan Lampung, Tahun 2015. Hlm. 13.

⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, 2006. Hlm. 25.

2. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan.⁶ Secara singkat kompetensi absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara. Misalnya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara perkahwinan umat Islam, sedangkan bagi yang non muslim menjadi kompetensi absolute peradilan umum. Kekuasaan Absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah dirubah melalui UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkahwinan, Warisan, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.⁷

Apa yang telah ditetapkan menjadi kewenangan suatu badan peradilan secara mutlak menjadi kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perkara. Namun, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau tidak termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang memintanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya, maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut dengan eksepsi absolute.

⁶*Ibid*, hal. 27.

⁷Linda Firdawaty, *Op cit.* hlm. 15.

Kewenangan mengadili berdasarkan jenis perkara dan tingkatan pengadilan maksudnya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung ke Pengadilan Tinggi Agama (Banding).⁸

2. Alasan Dan Faktor Penyebab Perceraian.

Sesuai dengan rumusan masalah, maka ada dua tema penting yang penulis ajukan sebagai pertanyaan pada Hakim di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang yaitu alasan dan faktor terjadinya perceraian dan apakah sering berlakunya perceraian disebabkan dari pihak suami atau isteri. Dan disini penulis telah menyediakan pedoman wawancara untuk penelitian dalam hal ini.

Ibu Hakim Mufdatul Hasanah, adalah sebagai Ibu Hakim di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang, memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut bahwa alasan dan faktor berlakunya perceraian ada banyak sekali masalah dalam terjadinya perceraian.

“Di antaranya adalah di sebabkan permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), moral, tidak ada keturunan, salah satu pihak meniggalkn pihak lain, murtat, perselisihan terus menerus, dan tidak ada tanggung jawab. Tetapi pada masa sekarang yang berkembang di luar masakini adalah berkaitan dengan permasalahan narkoba. Maka perceraian ini terjadi disebabkan pihak isteri mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama dengan alasan suaminya di penjara lebih dari 5 tahun, sebagaimana telah disebutkan didalam pasal 116 atau pasal 19 huruf c kompilasi hukum

⁸ Linda Firdawaty, *Op cit.* hlm. 14.

islam, perceraian ini tidak perlu pembuktian yang lain hanya cukup dengan kondisi dari hakim dan akan langsung diputuskan perceraian di pengadilan.”⁹

Berlakunya perceraian disebabkan dari pihak suami atau isteri. Sebagai mana yang di katakan Ibu Hakim Mufdatul Hasanah bahwasanya perceraian yang berlaku di Pengadilan Agama Tanjung Karang,

“Lebih banyak pada cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan dari pihak isteri. Kerana cerai talak itu ia lebih panjang persidangannya, kalau cerai gugat begitu sudah dikabulkan 14 hari kemudian keluar aktar cerai tetapi kalau cerai talak begitu sudah prihatin dan penerbatan tetap, masih ada ikrar lagi dan setelah keputusan itu, nanti akan diberi izin kepada pemohon siapa untuk menjatuhkan talak 1 raj’i terhadap pemohon setelah itu tunggu sampai 14 hari, jika keluarganya bisa menerima baru pihak pengadilan akan memnaggil lagi untuk si suami untuk menjatuhkan talak didepan pengadilan, barulah akan dikeluarkan aktar cerai. Maka dari berkas yang disampaikan pada saya setiap kasus dibedakan dari warna kulit berkas yaitu bagi cerai gugat berkas yang berwarna merah, cerai talak berkas berwarna hijau, dan diluar perceraian berkasnya berwarna kuning, jika saya lihat sekilas berkas yang datang pada saya terlihat lebih bnyak berkas yang berwarna merah yaitu cerai gugat. Jika mau dilihat dengan lebih jelas rujuk kepada bahagian Meja 3, Panitera Mudah Hukum.”¹⁰

⁹ Wawamcara bersama Ibu Mufdatul Hasanah pada tanggal 17 MARET 2017, hari Jum’at.

¹⁰ Wawancara bersama Ibu Mufdatul Hasanah pada tanggal 17 MARET 2017, hari Jum’at.

Jumlah perkara di PA Tanjung Karang :

		Tahun	2013	2014	2015	2016	Jumlah
Jenis perkara	Bidang Perkawinan	Izin Poligami	5	2	1	2	10
		Izin Kawin	-	-	-	-	-
		Dispensasi Kawin	-	-	4	11	15
		Penc. Perkawinan	-	-	-	-	-
		Pen. Perkr. Oleh PPN	-	-	-	-	-
		Pemb. Perkawinan	-	-	2	1	3
		Kel. Kew. Suami/isteri	-	-	-	-	-
		CERAI TALAK	564	627	614	618	2423
		CERAI GUGAT	1473	1676	1904	1984	7037
		Harta Bersama	9	12	15	17	53
		Penguasaan Anak	11	9	13	4	37
		Nafkah Anak	-	2	-	-	2
		Hak-Hak Bekas Isteri	-	-	-	-	-
		Pengesahan Anak	-	-	-	-	-
		Penc. Kek. Org Tua	-	-	-	-	-
		Penc. Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-
		Pen. Org lain Sbg Wali	10	3	11	11	35
		Ganti Rugi Thd Wali	-	-	-	-	-
		Asal Usul Anak	-	-	-	-	-
		Pengangkatan Anak	6	2	9	7	24
		Penolakan Kawin Campur	-	-	-	-	-
		Istbath Nikah	392	112	35	216	755
		Wali Adhol	6	-	-	5	11
	Gugatan Waris	6	4	3	7	20	
	Pemohonan Waris	25	58	24	54	161	
	Wasiat	-	-	-	-	-	
	Hibah	-	-	1	-	1	
	Wakaf	-	-	-	-	-	
	Zakat	-	-	-	-	-	
	Infak	-	-	-	-	-	
	Shodaqoh	-	-	-	-	-	
		Ekonomi Syariah	-	1	-	1	2
	Derden Verzet	-	-	-	2	2	
	Lain-Lain	-	-	1	1	2	

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah	Kes Yang Berjaya Disidang	Kes Yang Ditolak
2013	1473	564	2037	867	1170
2014	1676	627	2303	1018	1285
2015	1904	614	2518	1105	1413
2016	1984	618	2602	1135	1467
Jumlah	7037	2423	9460	4125	5335

Jadual 1: Rekapitulasi Tentang Perceraian PA Tanjung Karang Tahun 2013 Sehingga 2016

Faktor Perceraian	2016	2015	2014	2013
Ekonomi	164	113	138	165
Perselisihan/ Pertengkar	779	541	477	477
Meninggalkan salah satu pihak	75	-	-	-
Gangguan pihak ketiga	-	118	79	37
Tidak ada tanggung jawab	-	270	229	135
Dihukum Penjara	20	-	-	-
Mabuk	26	-	-	-
Judi	27	-	-	-
Poligami	18	8	11	1
KDRT	19	-	24	2
Cemburu	-	35	22	34
Krisis Moral/ Akhlak	-	-	23	-

Laporan Faktor Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Tanjung Karang:

Berdasarkan catatan petugasnya kasus perceraian disebabkan beberapa faktor. Dari data tersebut, kasus perceraian pada tahun 2013 didominasi, secara umum faktor yang lebih menonjol pada tahun 2013 yaitu faktor ekonomi sebanyak 165 kasus, perselisihan/ pertengkar terus menerus sebanyak 477 kasus, gangguan pihak ketiga sebanyak 37 dan tidak ada tanggung jawab sebanyak 135 kasus. Pada tahun 2014 kasus tidak ada tanggung jawab sebanyak 229 kasus diikuti faktor

ekonomi sebanyak 138 kasus, perselisihan/ pertengkaran terus menerus sebanyak 477 kasus dan ditambah dengan kasus gangguan pihak ketiga sebanyak 79 kasus.

Seterusnya pada tahun 2015 faktor penyebab perceraian semakin meningkat dari tahun sebelumnya dalam kasus perselisihan/ pertengkaran terus menerus sebanyak 541, gangguan pihak ketiga sebanyak 118, tidak ada tanggung jawab sebanyak 270, ekonomi sebanyak 113 dan di tambah dengan kasus cemburu sebanyak 35. Manakala pada tahun 2016 pula tegasnya dari panitera muda hukum adapun peningkatan jumlah kasus perceraian pada tahun ini adalah akibat faktor perselisihan/ pertengkaran terus menerus sebanyak 779 kasus dan kasus ekonomi sebanyak 164 kasus . Faktor perselisihan/ pertengkaran menjadi salah satu faktor pemicu yang lebih dominan pada tahun 2016. “Selain masalah perekonomian, keharmonisan rumah tangga juga masih salah satu pemicu. Dalam praktiknya pengadilan telah melakukan upaya mediasi, namun terbentur konflik parah dalam keluarga,” kata Syukur. Laporan faktor penyebab perceraian dari tahun 2013 sehingga 2016 dapat penulis paparkan dengan bentuk gambaran secara ringkas sepenuhnya ada dilampiran;



3. Prosedur Perceraian

Sejarah dengan prinsip Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mempersulitkan terjadinya perceraian, maka “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹¹ Ibu Hakim Mufdatul Hasanah menjelaskan:

“Para pihak yang akan mengajukan perceraian ke pengadilan sudah membawa surat gugatan, dan trus ke onestop service, di onestop servic semua pelayanan terpadu disana, dari mulai pendaftaran perkara sampai pengambilan akta cerai dan salinan putusan jadi dari mulai onestop servic ke meja satu, dari meja satu baru di taksir yaitu berapa biayanya. Harga dari luar kota dan dalam kota harganya berbeda. Di luar kota juga akan dilihat namanya radios, itu yang menentukan biaya jarak tempuhnya, kerana itu jurusita atau jurusita pegantian yang akan menyampaikan panggilan itu, biayanya terpantau jarak tempuhnya dari tempat pengadilan ke tempat penggugat atau tergugat namanya radios, kalau radiosnya jauh ya biayanya lebih besar daripda radios yang dekat, begitu juga diluar kota kerana diluar kota itu nanti pengadilan di wilayah lain yang kan memanggil setelah itu baru dikirimkan di tempat pengadilan yang diajukan gugatan. Setelah di taksir akan dikasi skum surat kuasa untuk dibayar, skom itu untuk ke bank, nanti bayar sendiri ke bank dan bukti bayarnya dibawa lagi kekasir, setelah diberi bukti bayar nanti dikasi no perdaftaran dan perkara, trus dikasikan pada penggugat dan tergugat, setelahitu baru berkasnya berjalan”.¹²

Tambahan dari Pak Syukur yaitu sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang menerangkan mengenai penetapan besaran tarif

¹¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, hlm. 549.

¹² Wawancara bersama Ibu Mufdatul Hasanah pada tanggal 17 maret 2017, hari Jum'at.

pengurusan perceraian berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : WB-A1/2653/XI/2015 tanggal 13 November 2015. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Pak Syukur menuturkan proses perceraian yang terjadi jika lancar membutuhkan waktu satu bulan. "Minimal kalau lancar misal di radius 1, ya 2 kali sidang bisa sebulan. Maksimal paling lama 5 bulan," terang Pak Syukur.¹³

Untuk biayanya sendiri, kata dia, bagi cerai gugat dalam radius I sebesar Rp391.000, radius II Rp441.000, radius III Rp541.000. sedangkan untuk biaya cerai talak pada radius I dikenakan biaya sebesar Rp511.000, radius II sebesar Rp581.000 dan radius III sebesar Rp725.000. Biaya tersebut, lanjut Syukur, sesuai dengan rincian biaya untuk biaya pendaftaran, proses, panggilan penggugat, panggilan tergugat, redaksi dan materai berdasarkan surat keputusan.

Selain untuk proses perceraian, tambah Syukur, Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang juga melayani dispensasi kawin serta izin poligami. "Dispensasi kawin yakni nikah yang belum cukup umur, nah itu disahkan disini dulu. Jadi disini minta izin dari pengadilan baru di KUA bisa menikah. Kewenangan izin poligami juga," tandasnya.¹⁴

Surat gugatan/permohonan yang diterima oleh pengadilan agama kemudian diberi nomor dan didaftar pada buku register, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, harus diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk ditetapkan Majelis Hakimnya (PHM) yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. Setelah ketua majelis menerima PHM dari Ketua Pengadilan Agama. Kepadanya diserahkan

¹³ Wawancara bersama Bapak Syukur pada tanggal 17 maret 2017, hari Jum'at.

¹⁴ Wawancara bersama Bapak Syukur pada tanggal 17 maret 2017, hari Jum'at.

berkas perkara yang bersangkutan. Majelis Hakim segera mempelajari berkas tersebut, dan dalam waktu satu minggu setelah berkas diterima. Majelis Hakim membuat Surat Penetapan Hari Sidang (PHM) untuk menentukan hari sidang pertama akan dimulai. Sekaligus Ketua Majelis Hakim menunjuk pula Panitera Sidang. Kemudian, Juru Sita/Juru Sita pengganti memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadapi sidang.¹⁵

Pengadilan Agama mempelajari isi surat yang dimaksudkan pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 dan waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendaknya itu. Pengadilan agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan meminta bantuan kepada Badan Penasihat Pekahwina dan Penyelesaian Pekahwinan (BP4) setempat agar kepada suami isteri dinasihati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan berpendapat adanya alasan talak, maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak dimaksudkan. Suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dengan hadirnya isteri serta alasannya dan mendatangkan surat ikrar tersebut.¹⁶

Pada hari sidang pertama, bahkan pada sidang-sidang berikutnya. Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Pada sidang upaya perdamaian, inisiatif perdamaian dapat timbul dari hakim, penggugat atau

¹⁵ Mardani, *Hukum Acara Pedata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Editor, Tarmizi. Ed. 1. Cet. 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 84.

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkahwinan Islam*, PT Bumi Aksara Jl. Sewo Raya, Jakarta, Cetakan Kelima, 2004, hlm. 200.

tergugat. Hakim harus sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka pengadilan akan mengeluarkan akta perdamaian (*acta van vergelijik*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau Peninjauan Kembali (KP), dan tidak dapat dijadikan gugatan baru lagi.

Ketentuan formal dari suatu putusan perdamaian sebagai berikut. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak, dengan unsur-unsur persetujuan yaitu:

- Adanya kata sepakat secara rela atau *toetemming*;
- Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan;
- Objek persetujuan mengenai pokok tertentu (*bepaalde onderwerp*);
- Berdasarkan alasan yang diperoleh dalam *geoorloofde oorzaak*;¹⁷

Putusan perdamaian yang dimuat dimuka sidang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perdamaian bisa pula dilakukan oleh para pihak yang berperkara di luar sidang pengadilan. Perjanjian semacam ini hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, maka masih harus diajukan melalui suatu proses di pengadilan. Dalam perjanjian perdamaian tidak boleh terdapat cacat yang mengandung unsur kekeliruan (*devaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*), bila mengandung cacat, maka putusan perdamaian dapat dibatalkan.

¹⁷ Mardani, *Op cit.* hlm. 84.

Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan. Pada tahap pembacaan gugatan, maka pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan *petitum*) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang menjadi objek pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

Pembacaan gugatan/ permohonan dibacakan oleh penggugat/ pemohon dan atau kuasanya, jika penggugat/ pemohon tidak bisa baca tulis, maka gugatan/ permohonan dapat dibacakan Ketua Majelis atau yang mewakilinya. Pada tahap pembacaan gugatan ini terdapat beberapa kemungkinan dari penggugat/ pemohon, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Mencabut gugatan

Gugatan dapat dicabut secara sepihak, jika perkara belum diperiksa tetapi jika perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabuta perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat. Apabila perkara belum ditetapkan hari sidangnya maka gugatan dapat dicabut dengan surat, dapat pula dilakukan dengan lisan di muka sidang dan dicatat di Berita Acara Persidangan.

2. Mengubah gugatan

Jika hakim melihat bila surat gugatan/permohonan yang dibuat belum sempurna, hakim dibenarkan memberikan penerangan kepada penggugat/pemohon untuk mengubah dan menyempurnakan gugatannya, permohonannya sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materil yang

¹⁸*Ibid*, hlm. 85.

menyebabkan pokok gugatan/permohonan menjadi lain dan/atau menambah tuntutan.

3. Mempertahankan gugatan

Jika penggugat tetap mempertahankan gugatannya, maka sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu *replik-duplik* (tahap jawab-berjaawab), baik antara pihak dengan pihak maupun antara hakim dengan pihak.

Hal yang perlu diingat dalam tahap *repli-duplik* ialah,

- Tergugat/termohon selalu mempunyai hak bicara terakhir.
- Pertanyaan hakim kepada para pihak hendaklah terarah, sesuai dengan hukum, begitu juga *replik* dan *duplik* dari pihak.
- Semua jawaban atau pertanyaan dari hakim harus melalui dan izin dari Ketua Majelis.
- Pertanyaan dari hakim kepada pihak, yang bersifat umum atau *policy* arahnya sidang, selalu oleh Hakim Ketua Majelis.

Pada tahap ini ada beberapa kemungkinan dari tergugat, yaitu

a. Eksepsi (tangkisan).

Eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan yang tidak mengenai pokok perkara dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan suatu cara agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak. Eksepsi secara garis besar dibagi kepada 2 (dua) bagian:

1. Eksepsi prosesual, yaitu eksepsi yang berdasarkan Hukum Acara (hukum proses), meliputi:

- Eksepsi tidak berwenang secara absolute (pengadilan agama tidak berwenang memeriksa perkara tersebut);
- Eksepsi tidak berwenang secara relatif (peradilan yang dituju tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, tetapi wewenang peradilan agama di wilayah lain);
- Eksepsi *nebis in idem* (persoalan yang sama telah pernah di putus dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau perkara tersebut masih dalam perkara banding atau kasasi);
- Eksepsi diskualifikator (bahwa yang penggugat tidak mempunyai kualifikasi/sifat untuk bertindak atau mengajukan gugatan, atau penggugat salah menentukan tergugat, baik mengenai orangnya dan/atau identitasnya);
- Eksepsi *abscuurlibel* (gugatan kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami, atau bertentangan).

2. Eksepsi materil, yaitu eksepsi yang berdasarkan hukum materil, yang meliputi:

- Eksepsi *dilatoir* (eksepsi yang menyatakan, bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan, misalnya oleh karena penggugat telah memberikan penundaan pembayaran)
- Eksepsi *peremtoir* (eksepsi yang menghalangi dikabulkannyagugatn, misalnya oleh kerana gugatan yang diajukan telah kedaluwarsa (lampu waktu).

b. Mengaku bulat-bulat.

- c. Membantah.
- d. Membantah dengan *clausa* (syarat).
- e. *Referte* (jawaban berbeli-belit).
- f. Rekonvensi (mengajukan gugat balik terhadap penggugat).

Tahap selanjutnya adalah pembuktian. Pada tahap ini setiap pihak mengajukan bukti-bukti, baik alat bukti surat ataupun saksi-saksi. Dan hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak lawannya atau kepada saksi-saksi yang mengajukan. Selanjutnya, tahap kesimpulan pada tahap ini para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung.

Tahap terakhir, yaitu putusan/penetapan hakim. Tahap ini diawali dengan musyawarah Majelis Hakim, dilaksanakan secara rahasia. Jika ada 2 (dua) orang hakim anggota Majelis Hakim berpendapat sama, maka hakim yang kalah suara itu, harus menerima pendapat yang sama itu. Jika terjadi masing-masing anggota hakim itu berbeda pendapat satu sama lain, maka permasalahan itu dapat diselesaikan dengan alternatif (1) Persoalan tersebut dibawa ke Sidang Pleno Majelis Hakim. (2) Ketua Majelis Hakim karena jabatannya dapat menggunakan hak vetonya dalam menyelesaikan perkara tersebut, dengan catatan pendapat hakim yang tidak sepakat dicatat di dalam buku catatan hakim yang telah disediakan. Setelah itu baru dijadwalkan sidang pembacaan putusan. Setelah putusan selesai dibacakan, Majelis Hakim akan menanyakan kepada para pihak, apakah mereka menerima putusan atau tidak. Bagi yang tidak menerima mempunyai hak untuk banding.

Apabila dilihat masalah perceraian merupakan masalah yang banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya Undang-undang Perkahwinan. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain disebabkan kerana dalam kenyataannya dimasyarakat suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian dan tampaknya hal itu terjadi dengan cara yang mudah. Bahkan adakalanya banyak terjadi perceraian itu kerana perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki.

Sebaliknya itu, dalam hal seorang isteri yang merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya, tidaklak semudah seperti yang dapat dilakukna oleh seorang suami terhadap isterinya, sehingga sering pula terjadi seorang isteri masih berstatus sebagai seorang isteri tetapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang isteri. Berhubung dengan itu, terutama dikalangan kaum wanita, hal tersebut tentulah merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan, maka timbul suara-suara yang menghendaki supaya diadakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu, terutama untuk membatasi kesewenang-wenangan pihak laki-laki tersebut.

Maka boleh dikatakan, bahwa masalah perceraian inilah salah satu sebab yang mendorong untuk diciptakannya Undang-undang perkahwinan, di antara sebab yang lain. Dalam Undang-undang perkawinan, dicantumkanlah suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan

sejahtera, dengan pengertian bahwa untuk itu perlu dipersukar terjadinya perceraian.¹⁹

Dengan maksud untuk mempersukarkan terjadinya perceraian itu, maka ditentukanlah, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai layaknya suami isteri. seiring dengan itu ditentukan pula bahwa perceraian hanya mungkin dengan salah satu alasan seperti disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

B. MAHKAMAH SYARIAH KELANTAN MALAYSIA

1. Sejarah, Struktur Organisasi dan Kewenangan MS Kelantan

a. Sejarah Mahkamah Syariah Kelantan

Secara umumnya Mahkamah Syariah ialah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil dan jenayah agama mengikut bidang kuasa yang diperuntukan untuknya.

Untuk penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian terhadap Mahkamah Syariah yang terletak di sebuah kota/bandar di Negeri Kelantan yang dinamakan Kota Bharu yaitu Mahkamah Syariah Kota Bharu. Tinjauan umum tentang Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan.

Sejarah Berdiri Dan Latar Belakang Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan. Mahkamah Syariah pertama kali didirikan di negeri Kelantan adalah pada tahun 1060 H bersamaan 1650 M. Undang-undang yang berlaku pada masa

¹⁹ K. Wantjik saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Keenam, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 36.

itu adalah undang-undang Islam. Kemuncak perjalanan undang-undang Islam adalah pada zaman pemerintahan Sultan Mohamed III dari tahun 1890- 1891 di mana pencuri-pencuri yang terbukti bersalah di Mahkamah Syariah yang berada di Kota Bharu pada waktu itu dikenakan Hukum Hudud.²⁰

Kondisi ini berlanjutan sampai adanya campur tangan (intervensi) penjajah yang telah memperkenalkan undang-undang mereka ke dalam sistem perundangan yang berlaku pada waktu itu dan mengesampingkan undang-undang Islam sedikit demi sedikit melalui *enakmen* yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang di Mahkamah Syariah sehingga hanya undang-undang yang berkaitan dengan keluarga Islam saja yang diberlakukan. Sebagai misalnya *Enakmen* Tahun 1919 yang membatasi bidang kuasa (yurisdiksi) Mahkamah Syariah yang ada di Kota Bharu pada masa itu²¹.

Latar belakang usaha ke arah mewujudkan Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Negeri Kelantan bisa dilihat pada perkembangan kronologis sebagaimana berikut²². Yakni pada tanggal 4 Desember 1972, Majelis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam telah melakukan musyawarah dan menyetujui keberadaan Mahkamah Syariah yang diketuai oleh Allahyarham Tan Sri Syed Nasir Ismail, termasuk juga mengenai kedudukan Mahkamah Syariah tersebut dan juga keinginan untuk memperbaiki taraf Qadi-qadi Syariah seluruh Malaysia.

Pada tanggal 30 April 1983, Majelis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah mempertimbangkan laporan institusi tersebut dan mengakuinya

²⁰Bagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan*, (Kota Bharu: Mahkamah Syariah, 1998), Hlm. 1.

²¹Notis Nomor 33 Tahun 1919 (pembagian harta benda laki bini (suami istri) Kelantan).

²²Bagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *op.cit.*, Hlm. 3.

sebagai Mahkamah yang dapat memutuskan perkara-perkara di semua negeri.

Hal tersebut di antara lain menyentuh mengenai:

1. Struktur organisasi Mahkamah Syariah, kewenangan, prosedur dan tugastugas Qadi.
2. Negeri-negeri wajib mempunyai organisasi Mahkamah Syariah dengan struktur dan tanggungjawab semata-mata dalam perkara kehakiman.
3. Susunan struktur organisasi Mahkamah hendaklah mempunyai tiga peringkat yaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan (Banding) Syariah.
4. Perlu diwujudkan satu bentuk perkhidmatan (pelayanan) kehakiman dan perundangan Syariah di tiap-tiap negeri.

Tanggal 2 dan 3 Juni 1990, Jabatan Perkhidmatan Awam (Kantor Pelayanan Umum) dan perbendaharaan Malaysia telah membuat uji kelayakan pendirian institusi Mahkamah Syariah Negeri. Dan pada tanggal 9 Juni 1991, seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari alim ulama, institusi keuangan kerajaan serta orang-orang yang mempunyai kewenangan memikul tugas itu telah menyetujuinya. Dan pada tanggal 3 Nopember 1991, Majlis Mesyuarat Negeri telah membicarakan kertas MMK Bil. 22/862/91(25) dan kemudian menyetujui institusi kehakiman tersebut yang terlebih dahulu bergantung kepada keadaan keuangan. Kemudian pada tanggal 16 Januari 1995, keputusan ini telah dimaklumkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam (Departemen Pelayanan Umum) untuk mendapat pertimbangan dan perakuan daripada Perbendaharaan Malaysia untuk mengesahkan lembaga tersebut sesuai dengan perkara 112 Perlembagaan Persekutuan.

Pada tanggal 2 Mei 1996, diadakan Musyawarah Jawatankuasa Khas di mana Jawatan-jawatan Tingkatan Tertinggi (JKTT) telah bersetuju dengan cadangan pelaksanaan sepenuhnya pengasingan perjawatan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan dan perwujudan jawatan-jawatan Ketua Hakim Syariah, Hakim Mahkamah Tinggi/Rendah Syariah dan Jawatan-jawatan sokongan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan. Selanjutnya pada 17 Juli 1996, Perbendaharaan Malaysia telah mengeluarkan kelulusan tugas Bil 67 Tahun 1996 yang berkuatkuasa mulai tanggal 15 Juli 1996 mengenai perjawatan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan.²³

Pada Juli 1998 telah didirikan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan untuk menggantikan Mahkamah Qadi yang terdiri daripada:

1. Mahkamah Rayuan (Banding) Negeri yang berlokasi di Kota Bharu dan diketuai oleh Y.A.A. Ketua Hakim Syarie.
2. Mahkamah Tinggi Syariah yang diketuai oleh Y.A.A. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.
3. Mahkamah Rendah Syariah yang diketuai oleh Y.A. Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

Mahkamah Syariah Negeri bernaung di bawah Jabatan (Departemen) Kehakiman Syariah Negeri Kelantan bertujuan untuk tetap konsentrasi dan perhatian dalam bidang Kehakiman Syariah, serta pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang dan kaedah-kaedah yang berkaitan yaitu²⁴:-

1. *Enakmen* Pentadbiran Mahkamah Syariah No. 3 Tahun 1982

²³ *Ibid.* Hlm. 3

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 4.

2. *Enakmen* Kanun Jenayah Syariah No. 2 Tahun 1985
3. *Enakmen* Acara Jenayah Syariah No. 9 Tahun 1983
4. *Enakmen* Acara Sivil No. 5 Tahun 1984
5. *Enakmen* Keluarga Islam No. 1 Tahun 1984
6. *Enakmen* Keterangan Mahkamah Syariah No. 1 Tahun 1991
7. *Enakmen* Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan No. 4 Tahun 1994 dan Hukum Syarak (berhubung dengan kesalahan-kesalahan)
8. Kaedah Hukuman Sebat Tahun 1987
9. Kaedah Pengacara Syarie Tahun 2000

Selain itu, beberapa nama struktur kelembagaan turut berubah di mana Ketua Hakim Syarie selaku Ketua Jabatan telah menggantikan Qadi Besar Kelantan dan jawatan ini telah dihapuskan. Begitu juga dengan jawatan Timbalan Qadi Besar turut dihapuskan dan diganti dengan jawatan baru yaitu 2 orang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah diwujudkan. Hakim Mahkamah Rendah Syariah telah diwujudkan dengan menggabungkan 2 buah Mahkamah Qadi Khas dan jajahan-jajahan (kabupaten) yang diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

Pada masa ini Ketua Hakim Syarie adalah Y.A.A. YB Dato' Hj. Daud bin Muhammad, 2 orang Hakim Mahkamah Tinggi adalah Y.A.A. Hj. Abdullah bin Man dan Y.A.A. Abu Bakar bin Abdullah Kutty. Manakala pada setiap jajahan di negeri Kelantan terdapat Mahkamah Rendah Syariah yang menguruskan tentang masalah dalam *Enakmen* Keluarga Islam untuk masyarakat di jajahannya.

I. Misi, Visi, Objektif, Fungsi dan Tujuan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan.

Adapun Misi Mahkamah Syariah Negeri Kelantan adalah untuk memprioritaskan pemberlakuan perundangan Islam yang sebenarnya di Negeri Kelantan secara lebih transparan, adil dan sistematis terutama di dalam penyelesaian kasus-kasus banding secara efektif.

Visi Mahkamah Syariah Negeri Kelantan adalah untuk menjadikan sebuah agensi negeri yang adil dan berwibawa dalam melaksanakan sistem perundangan Islam yang lengkap berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas demi menegakkan keadilan.²⁵ Adapun objektif Mahkamah Syariah Negeri Kelantan adalah:

1. Pada prinsipnya tujuan berdirinya Mahkamah Syariah adalah sama dengan tujuan pendirian Mahkamah Awam (Umum) yaitu untuk menegakkan keadilan dan menghukum pelaku-pelaku agar menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bermoral serta mengembalikan hak kepada yang berhak.
2. Selain itu, tujuan Mahkamah Syariah juga adalah untuk memberikan pelayanan berdasarkan Undang-undang Islam serta adil, efisien dan efektif.
3. Di samping itu, tujuannya di peringkat Negeri Kelantan adalah untuk menjadikan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan satu badan atau lembaga yang dapat melaksanakan otoritas Hukum Syarak ke atas seluruh umat Islam dalam negeri Kelantan khususnya menurut

²⁵Jabatan Kehakiman Negeri Kelantan, *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Kelantan*, (Kota Bharu: Mahkamah Syariah Kota Bharu, 1992), Hlm. 6.

perundangan Islam yang lengkap berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas²⁶.

Fungsi Mahkamah Syariah Negeri Kelantan adalah:

1. Melaksanakan Undang-undang Islam sesuai dengan otoritas yang diberikan kepadanya.
2. Mewujudkan sistem administrasi kehakiman Islam yang teratur dan efektif.
3. Menerima, mendengar dan menyelesaikan kasus-kasus yang di bawa ke Mahkamah Syariah dengan adil dan saksama berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Begitu juga beberapa tujuan dan peranan Mahkamah Syariah Kelantan di antara lain adalah:

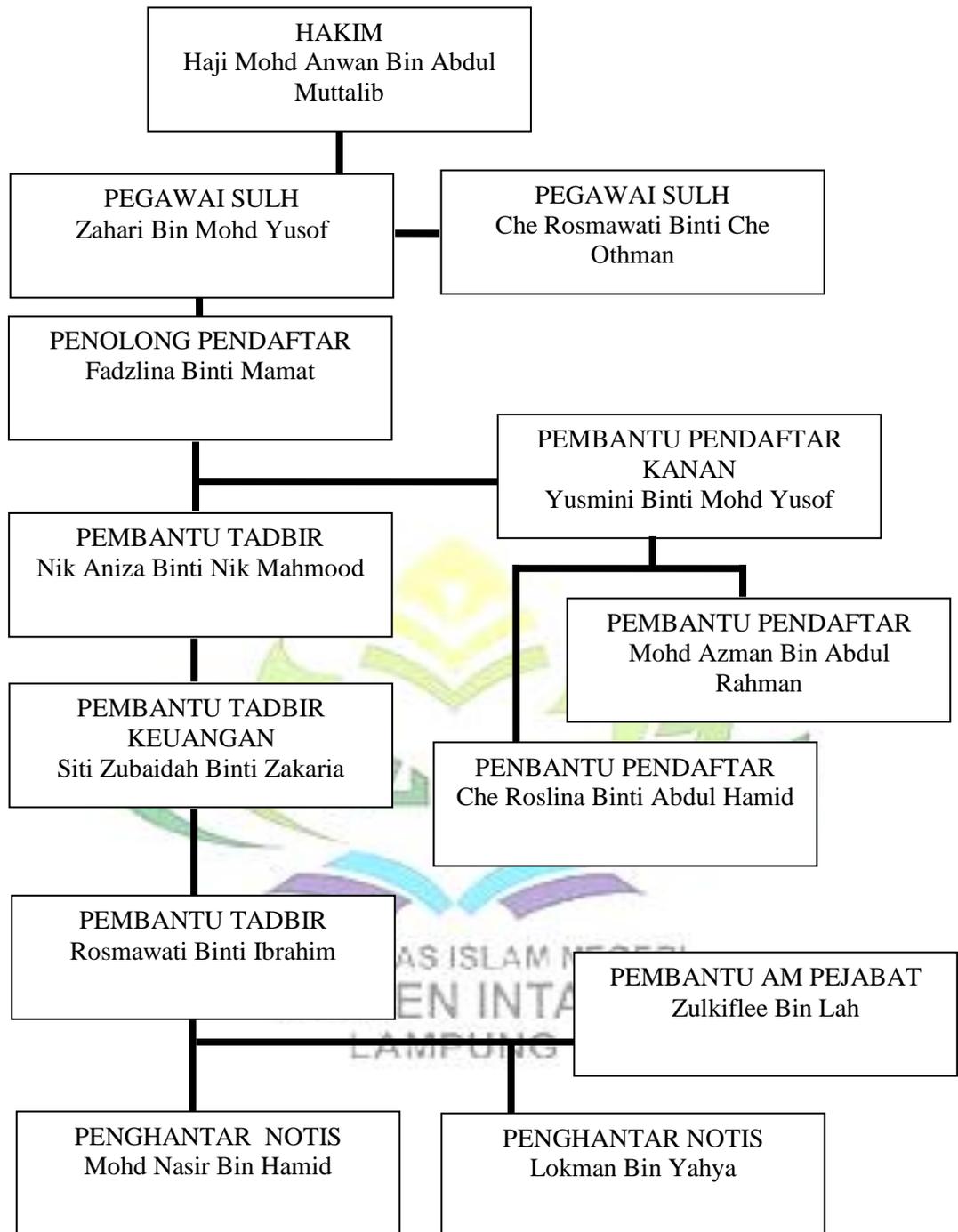
1. Mengekalkan perundangan Islam yang diperuntukkan kepada lembaga ini bagi menjamin setiap Muslim patuh dan tidak melanggar perintah Allah SWT berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Menjalankan perundangan Islam berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah untuk menjamin kesejahteraan orang Islam.
3. Melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam serta mengawasi mereka supaya menjalani kehidupan mengikut syariat Islam.
4. Menyelamatkan umat Islam daripada keruntuhan rumah tangga.
5. Tempat rujukan untuk mendapatkan khidmat nasehat serta menyelesaikan masalah rumah tangga.

²⁶*Ibid.* Hlm. 7.

6. Memberi bimbingan dan nasehat kaunseling kepada pasangan yang ingin berumah tangga agar dapat membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana tuntutan agama.
7. Tempat membuat rayuan atau tuntutan daripada pihak istri untuk mendapatkan nafkah daripada suaminya yang sudah bercerai.
8. Tempat menyelesaikan masalah kekeluargaan seperti nikah kawin, perceraian, talak, fasakh dan sebagainya.
9. Menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat seperti judi, minum arak, riba, khalwat dan lain-lain perkara mungkar.
10. Membantu serta menyelesaikan pembagian harta pusaka dan hal-hal berkaitan seperti wasiat.
11. Juga bertugas sebagai penasihat jika diminta oleh kerajaan.
12. Badan yang dilantik oleh kerajaan yang bertanggungjawab memberi penerangan berkait dengan keagamaan, kekeluargaan dan sentiasa berdakwah sepanjang masa.
13. Menerapkan nilai-nilai Islam agar orang Islam mengamalkan sistem dan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka²⁷.

²⁷Government of Kelantan Gazette, *Warta Kerajaan Negeri Kelantan*, (Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 2004), Hlm. 345.

b. Struktur organisasi Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan;



c. Kewenangan Mengadili Mahkamah Syariah Kota Bharu

Kewenangan mengadili di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu antaranya adalah sebagai berikut:-

1. Membicarakan kasus-kasus yang diperuntukkan oleh enakmen negeri.
2. Mendengar dan memutuskan kasus-kasus tersebut.
3. Menyediakan kertas-kertas keputusan dan laporan Mahkamah.
4. Membicarakan kasus-kasus diperingkat daerah²⁸.

Selain Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah juga memiliki kewenangannya tersendiri yaitu:

1. Membicarakan kasus-kasus yang diperuntukkan oleh enakmen negeri kepadanya.
2. Mengeluarkan perintah kasus-kasus perdata dan pidana.
3. Menyelesaikan dan mengkonfirmasi kasus-kasus waris.
4. Menguruskan kasus-kasus rayuan (banding).
5. Menyediakan jurnal Mahkamah untuk diterbitkan (untuk beberapa negeri).

Dan Mahkamah Rayuan Syariah (Banding), kewenangannya adalah:

1. Bertugas untuk mendengar kasus-kasus rayuan (banding).
2. Mempunyai kuasa pembatalan mana-mana sabitan hukuman oleh Mahkamah Syariah.
3. Mengurangi hukuman.
4. Menerima supaya diadakan pembicaraan kembali atau ulang bicara.

²⁸Bagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *op.cit.*, Hlm. 7.

5. Menerima rayuan (banding) tertuduh (tergugat) yang dihukum penjara atau sanksi tidak kurang dari RM25.00 (Rp 76.000) dan telah membuat permohonan banding sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
6. Setiap permohonan perkara banding akan didengar sekurang-kurangnya oleh tiga orang panel (hakim) rayuan daripada panel (hakim) Rayuan Syariah yang ditunjuk dan disahkan oleh KDYMM Sultan (Ketua Hakim adalah Ketua Panel Rayuan Syariah). Keputusan Mahkamah adalah mutlak dan sah.²⁹

Suatu *enakmen* mempunyai otoritas untuk mengubah dan menyatukan Undang-undang Keluarga Islam mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, penjaga dan permasalahan lain yang terkait dengan kehidupan berkeluarga. *Enakmen* ini boleh disebut sebagai *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002*. *Enakmen* ini harus diberlakukan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan dalam warta, media massa dan cetak. *Enakmen* ini berlaku untuk semua orang Islam yang tinggal dalam negeri Kelantan Darul Naim dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam Negeri Kelantan Darul Naim tetapi tinggal di luar Negeri itu.³⁰

Semua kata dan ungkapan yang digunakan dalam *Enakmen* ini dan yang tidak didefinisikan dalam Akta Tafsiran 1948 dan 1967 harus memiliki arti yang diberi kepadanya masing-masing oleh Akta itu sejauh yang arti tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Syarak.³¹ Duli Yang Maha Mulia al-Sultan bisa secara berkala mengubah, memotong dari atau menambah ke tabel itu. Tidak ada

²⁹ Government of Kelantan Gazette, *op.cit.*, Hlm. 404.

³⁰Bagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *op.cit.*, Hlm. 26.

³¹ Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Tahun 2002, Negeri Kelantan.

sesuatu yang terkandung dalam *enakmen* ini bisa mengurangi atau menyentuh hak-hak dan kekuasaan prerogatif Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan sebagai Ketua agama Islam dalam Negeri. Ini sebagaimana yang diatur dan disebutkan dalam Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan³².

2. Alasan dan faktor penyebab perceraian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka ada dua tema penting yang penulis ajukan sebagai pertanyaan pada Hakim di Mahkamah Syariah Kelantan yaitu alasan dan faktor terjadinya perceraian dan apakah sering berlakunya perceraian disebabkan permohonan cerai dari pihak suami atau isteri. Dan disini penulis telah menyediakan pedoman wawancara untuk penelitian dalam hal ini.

Ahmad Hariri Mohd Saad, adalah sebagai Hakim di Mahkamah Syariah Jeli, Kelantan, memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut bahwa alasan dan faktor berlakunya perceraian ada banyak sekali masalah dalam terjadinya perceraian.

“Kebanyakan kes (permasalahan) perceraian, sebab-sebab yang dikemukakan oleh plaintif (penggugat) dan defanden (tergugat) adalah tiada kefahaman dan tidak memberi nafkah. Jika dilihat pada fail data Mahkamah ia mungkin tidak sama dengan apa yang diajukan oleh plaintif (penggugat) kerana kebanyakan permasalahan yang asal akan di ubah oleh pihak Mahkamah kepada permasalahan yang lebih mudah adalah untuk memudahkan putusan persidangan, ia didaftarkan atas permasalahan

³² Government of Kelantan Gazette, *op.cit.*, Hlm. 404.

Tuntutan Perceraian. Dari permasalahan tersebut pihak suami yang lebih banyak mengajukan permohonan cerai berbanding pihak isteri.”³³

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Hakim tersebut bahwa hal perceraian ini kebanyakan berlaku di sebabkan kehidupan yang tidak serasi sehingga tidak dapat mencapai keluarga yang ditentukan didalam Islam.

Mohd Anwan Bin Ab. Muttalib, yaitu seorang Hakim Mahkamah Syraiah Kota Bharu, Kelantan, mengatakan bahwa,

“Diantara sebab-sebab yang dikemukakan oleh plantif (penggugat) dengan defendan (tergugat), sekiranya plantif (penggugat) merupakan isteri maka antara sebab yang di berikan adalah tiada persefahaman, tidak memberi nafkah. Manakala sekiranya plantif (penggugat) merupakan suami, sebab yang diberikan adalah tidak tahan dengan sikap isteri yang banyak berleter (bercakap), pemalas, tidak melaksanakan tanggungjawab isteri, curang. Kes (kasus) perceraian yang sering terjadi, pada kebiasaannya lebih tinggi peratus dari pihak isteri, manakala pihak suami kebanyakan melafazkan cerai diluar sidang, disebabkan kes (kasus) tidak direkotkan dalam mahkamah dan hanya dikenakan denda RM1000 (Rp3,000,000). Ini karena masyarakat Kelantan merupakan masyarakat yang fanatik dalam agama Islam, kebanyakan mereka tidak menuruti hukum atau undang-undang yang ditetapkan, maka mereka menggunakan hukum atas pengetahuan agama mereka sendiri.”³⁴

³³ Wawancara bersama Bapak Ahmad Hariri Mohd Saad pada tanggal 12 february 2017, hari Ahad.

³⁴ Wawancara bersama Bapak Mohd Anwan Bin Ab. Muttalib pada tanggal 28 february 2017, hari Selasa.

Sebagaimana mana yang di katakan diatas mengenai faktor perceraian yang terjadi memberi faktar sama dengan hakim yang pertama.

Ini merupakan sikap bagi seorang isteri keseluruhannya hampir sama dan merupakan suatu sifat yang tidak asing bagi kehidupan mereka. Dan jika dilihat keteranagn tersebut merupakan sikap seorang suami yang tidak dapat menahan sikap isteri menjadi suatu alasan yang sering diajukan di Mahkamah, dilihat pada data perkara Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai dan Tuntutan Perceraian dalam kasus Cerai Talak, merupakan perkara yang paling tinggi berbanding Cerai Gugat. Sebagaimana data yang diperolehi di Mahkamah Syariah Kelantan sebagai berikut:

Cerai Talak	2013	2014	2015	2016	Jumlah
Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai	600	634	795	716	2745
Tuntutan Perceraian	904	958	1197	1078	4137
Tuntutan Pengesahan Cerai Takliq	338	358	448	403	1547
Jumlah	1842	1950	2440	2197	8429

Cerai Gugat	2013	2014	2015	2016	Jumlah
Tuntutan Khuluq/ Tebus Talak	27	29	37	33	126
Tuntutan Fasakh	27	28	36	32	123
Jumlah	54	57	73	65	249

Jadual 2: Perceraian di Mahkamah Syariah Kelantan Tahun 2013-2016

Berdasarkan jadual di atas kasus carai talak lebih tinggi berbanding dengan cerai gugat. Maka dilihat pada keterangan diatas mengenai pihak yang banyak mengajukan cerai adalah pihak suami berbanding isteri, dengan kasus tuntutan

perceraian. Seterusnya mengenai faktor perceraian yang memicu musnahnya ikatan suami isteri, sebgaimana yang tercatat dalam analisis di bawah :

Faktor Perceraian	Jumlah
Tiada Persefahaman	2975
Masalah Keuangan	2162
Persetujuan Bersama	1166
Isteri Meninggalkan Suami	919
Suami Tidak Bertanggungjawab	506
Jenayah (Pidana)	429
Kekerasan Rumah Tangga	292
Poligami	168
Keagamaan	61
Jumlah	8678

**Jadual 3: Faktor Perceraian di Mahkamah Syariah Kelantan
Tahun 2013-2016**

Berdasarkan data yang diperolehi kasus perceraian disebabkan beberapa faktor. Dari kasus keseluruhannya yaitu sebanyak 8678 dari tahun 2013 hingga 2016, maka didominasi, secara umum faktor yang menjadi pemicu utama sebagai permasalahan perceraian adalah dalam permasalahan tiada kesefahaman sebanyak 2975 kasus, seterusnya permasalahan keuangan sebanyak 2162 kasus, manakala permasalahan persetujuan bersama sebanyak 1166 kasus, dan Isteri meninggalkan suami sebanyak 919 kasus. Seterusnya Suami Tidak Bertanggung Jawab sebanyak 506 kasus. Selain itu, permasalahan Jenayah sebanyak 429 kasus, hal ini yang bersangkutan dengan Hukum Pidana. Berlakunya keganasan Dalam rumah tangga

pula sebanyak 292, permasalahan poligami sebanyak 168 dan permasalahan keagamaan yaitu murtad sebanyak 61 kasus.

Di lihat pada permasalahan Jadual 3 di atas, bahwa punca perceraian yang terjadi merupakan penyebab berlakunya tidak ada kesefahaman menjadi pemicu utama sebagai faktor penyebab perceraian, dari permasalahan ini tidak dapat untuk penulis tentukan apakah ia dikarenakan pihak suami atau isteri yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan perselihan dalam hubungan suami isteri. Dari segi permasalahan keuangan merupakan kasus kedua tertinggi, sememangnya pihak suami berkewajiban dalam mencari nafkah dan mengurus ekonomi keluarga, akan tetapi hal ini menjadi sukar jika pihak suami tidak mempunyai perkerjaan. Di ikuti dengan permasalahan persetujuan bersama, kasus ini merupakan pihak suami dan isteri sendiri yang menginginkan hubungan mereka bercerai. Faktor persetujuan bersama, menjadi penyebab yang ketara dalam penigkatan perceraian ini karena perceraian persetujuan bersama amat mudah jika diajukan perceraian di mahkamah. Walaupun perceraian ini dikenakan denda ia tidak menjadi halangan bagi pasangan tersebut yang menginginkan perceraian.

Dari faktor perceraian yang berlaku, keseluruhan perceraian yang terjadi di mahkamah syariah Kelantan meyoritasnya perceraian yang bermula dari pihak suami yang melafazkan cerai diluar mahkamah. Dengan ini, penulis beraggapan sikap seorang suami yang tidak kaut dalam menanggung beban sebagai seorang suami dalam mencari dan mengurus keuanagn keluarga, maka karena itu banyak terjadi perceraian yang diluar mahkamah. Maka dari permasahan ini, tempoh pernikahan pasangan di Kelantan hanya dapat beratahan selama 5 tahun sahaja.

3. Prosedur perceraian

Adapun tata cara atau prosedur cerai talak dan cerai gugat dalam perundang-undangan Keluarga Muslim di Kelantan adalah sebagai berikut :

a. Prosedur Cerai Gugat

Prosedur permohonan cerai dari isteri, permohon diarahkan mengambil borang (formula) di Kaunter Mahkamah Syariah Kelantan atau Balai Islam Kelantan.³⁵

1. Permohon atau Penggugat

- i. Menyerahkan borang (formula) Permohonan Perceraian yang telah dilengkapkan
- ii. Bayar yuran pendaftaran (mengikut kadar yang telah ditetapkan setiap negeri)
- iii. Daftar kes (kasus) cerai di kaunter Mahkamah.
- iv. Terima tarikh dan masa hadir ke Mahkamah (tarikh tidak boleh melebihi 21 hari dari tarikh daftar)

2. Mahkamah serahkan saman kepada penggugat atau tergugat (dalam tempuh tidak melebihi 14 hari selepas kes (kasus) di daftarkan)

3. Penggugat atau Tergugat

- i. Hadir ke Mahkamah sesuai tarikh yang diberikan
- ii. Bawa bersama dokumen asal seperti, Surat Nikah atau Sijil Rujuk dan KTP.

4. Mahkamah lantik Jawatankuasa Pendamai

5. Suami isteri hadir ke pejabat Jawatankuasa Pendamai

- i. Hadir pada tarikh yang di tetapkan

³⁵ Jabatan Kehakiman Syariah Kelantan, *CARTA ALIRAN PROSES PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIAH*, Komplek Islam Lundang, Kota Bharu. Hlm. 4.

- ii. Memberi semua keterangan
6. Jawatankuasa Pendamai
 - i. Mengadakan proses perdamaian
 - ii. Kemukakan laporan bertulis dan serahkan pada hakim sama ada wujud perdamaian atau tidak.

(proses perdamaian ini dijalankan selama 6 bulan)
7. Mahkamah buat keputusan dari hasil laporan Jawatankuasa Pendamai
 - i. Jika isteri bersetuju untuk berdamai kes (kasus) dibatalkan
 - ii. Jika suami bersetuju cerai akan langsung dengan putusan cerai
 - iii. Jika isteri tidak bersetuju berdamai kes (kasus) dilanjutkan pada Majlis Hakam
8. Mahkamah lantik Hakim untuk jalankan proses Majlis Hakim
9. Suami dan isteri hadir ke Majlis Hakam
 - i. Hadir pada tarikh yang ditetapkan
 - ii. Memberi keterangan kepada Majlis Hakam
10. Hakim
 - i. Dapatkan kuasa talak
 - ii. Maklumkan keputusan kepada Hakim

(proses Majlis Hakam mengambil masa tidak melebihi 3 bulan)
11. Mahkamah perakukan keputusan Hakim
12. Suami atau Hakim melafazkan cerai
13. Mahkamah keluarkan perintah perceraian
14. Suami dan isteri
 - i. Menerima rekot perceraian

- ii. Membawa rekot perceraian dengan segera dan menyerahkan kepada Jabatan Agama Islam untuk daftar cerai.

15. Suami dan isteri hadir ke Jabatan Agama Islam

- i. Menyerahkan rekot cerai bersama dokuman Surat nikah atau Surat Rujuk dan KTP
- ii. Membayar yuran daftar cerai (mengikut ketetapan negeri)

16. Jabatan Agama Islam

- i. Mendaftar cerai
- ii. Mengeluarkan surat cerai.³⁶

b. Prosedur Cerai Talak (diluar sidang atau di hadapan sidang)

Prosedur permohonan cerai dari suami, permohonan diarahkan mengambil borang (formula) di Kaunter Mahkamah Syariah Kelantan atau Balai Islam Kelantan.³⁷

1. Permohon atau Penggugat

- i. Menyerahkan borang (formula) Permohonan Perceraian yang telah dilengkapi
- ii. Bayar yuran pendaftaran (mengikut kadar yang telah ditetapkan setiap negeri)
- iii. Daftar kes (kasus) cerai di kaunter Mahkamah.
- iv. Terima tarikh dan masa hadir ke Mahkamah (tarikh tidak boleh melebihi 21 hari dari tarikh daftar)

2. Suami dan isteri

- i. Hadir ke Mahkmah sesuai tarikh yang diberikan

³⁶ Proses cerai gugat : persidangan cerai gugat sebanyak lebih kurang 4 atau 5 kali sidang.

³⁷ Jabatan Kehakiman Syariah Kelantan, hlm. 3.

- ii. Bawa bersama dokumen asal seperti, Surat Nikah atau Sijil Rujuk dan KTP.
3. Mahkamah mendapat persetujuan perceraian dari isteri (tidak perlu jika perceraian telah terjadi di luar mahkamah)
4. Suami melafazkan cerai talaq satu (ikrar cerai)
5. Mahkamah mengeluarkan saman jika kasus perceraian diluar mahkamah..
6. Mahkamah:
 - i. Sahkan lafaz cerai suami,
 - ii. Keluarkan perintah perceraian
7. Suami dan isteri menerima rekod perceraian
8. Membawa rekot perceraian dengan segera dan menyerahkan kepada Jabatan Agama Islam untuk daftar cerai.
9. Suami dan isteri hadir ke Jabatan Agama Islam
 - i. Menyerahkan rekot cerai bersama dokuman Surat nikah atau Surat Rujuk dan KTP
 - ii. Membayar yuran daftar cerai (mengikut ketetapan negeri)
10. Jabatan Agama Islam
 - iii. Mendaftar cerai
 - iv. Mengeluarkan surat cerai.³⁸

Dalam pengikraan talak, undang-undang menjelaskan untuk diucapkan didepan pengadilan dari pernikahan yang terdaftar dalam catatan pemerintah Kelantan. Meskipun salah satu pihak murtad (bagi Muslim, Murtad adalah salah satu

³⁸ Prosedur Cerai Talak: Persidangan hanya satu kali sidang selama 45minit.

penyebab putusnya perkahwinan) maka tetap ikrar talak harus disampaikan didepan Pengadilan. Sedangkan jika terdapat seseorang yang melanggar peraturan tentang perceraian, misalnya melakukan ikrar perceraian talak didepan pengadilan, maka akan dihukum dengan hukuman denda maximal RM1,000.00 (Rp3.300,000) atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. (seksyen 125) Tentang Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah “Jika seseorang lelaki menceraikan isterinya dengan melafazkan talaq dengan apa-apa bentuk diluar Mahkamah atau di luar sidang pengadilan itu maka dia telah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit (Rp3300,00) atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Didalam buku panduan atau dikenali dengan buku kasus di Mahkamah Kelantan terbahagi beberapa bahagian bagi kasus perceraian, diantaranya ialah :

- Tuntutan Fasakh
- Tuntutan Khuluk/Tebus Talak
- Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai
- Tuntutan Perceraian
- Tuntutan Pengesahan Cerai Takliq

Bagi kasus Tuntutan Fasakh dengan Tuntutan Khulu/Tebus Talak di ajukan oleh pihak isteri yang di panggil Cerai Gugat. Seterusnya bagi Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai, Tuntutan Perceraian dan Tuntutan Pengesahan Cerai Takliq adalah kasus yang diajukan oleh pihak suami.

Jadi dalam masing-masing negara mempunyai persamaan dan perbedaan dalam konsep Perundang-undangan talak. Dalam hal ini sebab-sebab perceraian maupun

proses talak itu sendiri. Perbedaan-perbedaan tersebut banyak yang melatar belakangi, selain dari segi bentuk pemerintahan di negara Indonesia dan Malaysia yang berbeda juga kerana kultur masyarakat yang juga berbeda. Namun dari sekian banyak perbedaan-perbedaan konsep talak, juga ada persamaan-persamaan yang sangat menonjol yakni dalam konsep talak untuk keluarga muslim, kedua masyarakat negara ini banyak yang menganut aliran Madzhab Syafie yang dijadikan dasar dalam pembentukan-pembentukan hukum talak bagi keluarga muslim.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan.

1. Faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Dari hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, mengenai faktor perceraian yang berlaku di PA Tanjung Karang mempunyai pelbagai faktor. Antaranya adalah disebabkan permasalahan ekonomi 580 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 45 kasus, salah satu pihak meninggalkan pihak lain 75 kasus, perselisihan terus menerus 2274 kasus, tidak ada tanggungjawab 634 kasus, gangguan pihak ketiga 234 kasus, dihukum penjara 20 kasus, poligami 38 kasus dan cemburu 91 kasus. Dan dari data yang diperolehi punca perceraian yang meningkat di setiap tahun yaitu faktor perselisihan/ pertengkaran terus menerus, hal ini membuatkan kasus yang paling menonjol mencapai bilangannya sebanyak 2274 kasus pada tahun 2013 hingga 2016.

Dilihat pada faktor berlakunya permasalahan perselisihan dan pertengkaran terus menerus penulis tidak dapat untuk menilai apakah ia berpunca dari sikap seorang suami, akan tetapi dilihat pada permasalahan yang berlaku dan kasus yang diajukan di pengadilan menunjukkan pihak isteri yang lebih banyak mengajukan gugatan cerai berbanding suami, maka penulis beranggapan hal ini lebih menunjukkan permasalahan perceraian yang terjadi adalah berpunca dari pihak suami. Selain itu juga, permasalahan ekonomi juga menjadi salah satu faktor kedua yang meningkat dari tahun ke tahun, ini juga suatu faktor yang

menunjukkan bahwasanya seorang suami tidak dapat mencari nafkah dan mengatur ekonomi keluarga dengan baik, sehingga membuat pihak isteri nekat untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Sebagaimana penulis memahami bahwasanya pihak isteri tidak dapat menanggung tanggungjawab keluarga sendiri dan kehidupan berumahtangga yang penuh konflik dalam ketidaksefahaman. Jika dilihat dari rekapitulasi tentang perceraian dari PA Tanjung Karang dari tahun 2013 sehingga 2016 sesuai dengan kajian skripsi penulis bahwasanya perceraian tersebut lebih banyak berpuncak dari pihak isteri yang mengajukan cerai gugat, malah tiga faktor yang menjadi penyebab utama hancurnya ikatan perkawinan rumahtangga yaitu permasalahan ekonomi, perselisihan/ pertengkaran, dan tidak ada tanggungjawab.

Maka dari analisis ini, penulis beranggapan permasalahan yang terjadi di PA Tanjung Karang lebih menunjuk punca perceraian dari pihak lelaki. Sehingga menimbulkan para isteri mengajukan gugatan perceraian untuk mengambil keputusan memutuskan ikatan perkawinan mereka. Berkaitan dengan alasan perceraian ini, sifat bagi seorang suami maupun isteri seharusnya mempunyai pemikiran yang lebih formal dalam hubungan.

Misalnya dalam permasalahan ekonomi seharusnya kebutuhan biaya kehidupan adalah tanggungjawab seorang suami, akan tetapi bagi seorang isteri yang bertanggungjawab haruslah membantu dan memberi dorongan kepada suami dan bijak mengatur ekonomi dalam pengurusan rumahtangga. Kebutuhan kehidupan dari zaman kezaman mamang semakin meningkat. Lalu wajarlah pendapatan suami juga seharusnya meningkat. Tidak salah, jika bagi pihak suami membenarkan isteri bekerja dalam membantu biaya kehidupan keluarga. Selain

itu, pihak suami juga perlu menolong isterinya dalam mengurus kerja rumah tangga agar tidak menimbulkan pertengkaran dan perselisihan hubungan antara suami isteri.

2. Faktor-faktor perceraian di Mahkamah Syariah Kelantan.

Di Mahkamah Syariah Kelantan faktor perceraian yang berlaku yaitu disebabkan tiada persefahaman dan pihak suami tidak dapat memberi nafkah yang cukup, yang sering diberi alasan oleh pihak isteri. Manakala bagi pihak suami yang mengajukan cerai talak kebanyakannya memberi alasan tidak tahan dengan sikap isteri yang banyak bicara, pemalas, tidak melaksanakan tanggungjawab isteri dan curang.

Secara umumnya, jumlah cerai gugat dan cerai talak di Kelantan dari tahun 2013 sehingga tahun 2016 yang berdaftar di Mahkamah Syariah Kelantan adalah sebanyak 8678 kasus. Kenyataan ini secara tidak langsung, telah menunjukkan ketidakmenitikberatkan dan kesedaran yang positif dalam kalangan masyarakat berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dalam keseluruhan kasus tersebut didominasi kasus cerai talak sebanyak 8429, yaitu kasus tertinggi berbanding kasus cegai gugat. Dengan analisis ini kebanyakan kasus tersebut muncul disebabkan suami menceraikan isteri diluar Mahkamah.

Dalam hal ini berpandu pada analisis yang penulis perolehi mengenai permasalahan perceraian ini lebih menunjukkan terjadinya perceraian berpuncak dari pihak suami terlalu gampang dalam melafazkan cearai. Walaupun demikian penulis tidak dapat untuk menyalahkan pada satu pihak saja, mungkin karena permintaan isteri terlalu tinggi sehingga pihak suami tidak mampu untuk

memenuhi kehendak isteri sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penulis berpendapat demikian kerana setelah dianalisis kasus perceraian tersebut lebih banyak perceraian yang terjadi diluar pengadilan. Sememangnya ia tidak dapat dipastikan jelas dan boleh jadi, ia juga berpunca dari pihak suami. Maka penulis berfikir jika tiada penyebab mengapa suami melafazkan cerai. Dengan itu penulis beranggapan pihak suami tidak dapat lagi mengatur dan menegur isterinya sehingga kebanyakan pihak suami membuat keputusan untuk melafaskan cerai di luar pengadilan dan setelah itu barulah diajukan ke Mahkamah.

Maka penulis membandingkan faktor perceraian antara Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Mahkamah Syariah Kelantan dari hasil penelitian melalui wawancara dan data yang diperolehi dari kedua pengadilan tersebut jelas menunjukkan bahwa faktor punca perceraian yang hampir sama akan tetapi yang menimbulkan punca berlaku perceraian mungkin berbeda. Manakala selama empat tahun tersebut. Jumlah perceraian di Mahkamah Syariah Kelantan keseluruhannya seramai 8678 pasangan dari tahun 2013 hingga 2016 manakala di PA Tanjung Karang pula jumlah perceraian secara keseluruhannya hanya sebanyak 4125. Hal ini menunjukkan bilangan kasus perceraian lebih banyak berlaku di Mahkamah Syariah Kelantan berbanding Pengadilan Agama Tanjung Karang. Sedangkan masyarakat di Tanjung Karang Indonesia lebih ramai dibandingkan masyarakat Kelantan Malaysia.

B. PROSEDUR PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG DAN MAHKAMAH SYARIAH KELANTAN MALAYSIA.

1. Prosedur Perceraian Pengadilan Tanjung Karang

Kehidupan pernikahan merupakan impian bagi setiap orang dewasa namun bahtera rumah tangga bila tidak dapat dipertahankan mungkin perceraian menjadi jalan satu-satunya. Adapun yang ingin mengurus perceraian dapat datang langsung ke Pengadilan Agama. Dan penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 118 HIR 142 Rbg jo Pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama tentang tata cara membuat surat gugatan yang di atur dalam Pasal 118 HIR 142 Rbg jo Pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989.

- a. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama.
- b. Yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat.
- c. Bila penggugat meniggal tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- d. Bila penggugat berkediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- e. Bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungnya pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
 - a. Gugatan tersebut memuat;

- b. Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat.
- c. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
- d. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo Pasal 89 UU no 7 tahun 1989. Bagi yang tidak mampu, dapat berprkara secara cuma-cuma (Pasal 237 HIR, 273 Rbg). Dan penggugat dan tergugat atau kuasanya manghadiri persidangan berdasarkan Pengadilan Agama.

Berdasarkan penjelasan Pasal 14 UU Perkawinan dan PP 9/1975 diatur tentang Cerai Talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

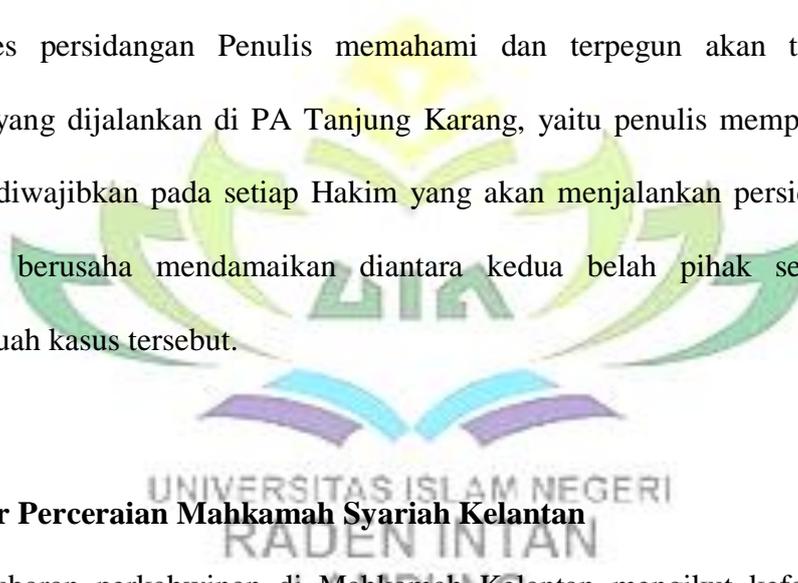
Hukum Negara Indonesia hanya mengakui talak yang diucapkan suami di depan Pengadilan Agama. Adapun talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut hukum agama. Di dalam artikel berjudul “Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan” (Hukum Online), Nasrulloh Nasution, S.H. menyatakan bahwa cerai talak yang dilakukan suami di luar Pengadilan Agama

menyebabkan ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum sebagaimana diatur oleh Negara.

Adapun cerai gugat (gugatan cerai) hanya dapat diajukan oleh istri sebagaimana terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI:

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Dalam proses persidangan Penulis memahami dan terpegun akan tatacara persidangan yang dijalankan di PA Tanjung Karang, yaitu penulis memperoleh bahwasanya diwajibkan pada setiap Hakim yang akan menjalankan persidangan kasus untuk berusaha mendamaikan diantara kedua belah pihak sehingga tamatnya sebuah kasus tersebut.



2. Prosedur Perceraian Mahkamah Syariah Kelantan

Kasus pembubaran perkahwinan di Mahkamah Kelantan mengikut kefahaman penulis, Tuntutan Fasakh dan Tuntutan Khuluq/ Tebus Talak adalah sebagai Cerai Gugat. Manakala Tuntutan Pengesahan lafaz cerai, Tuntutan perceraia dan Tuntutan pengesahan cerai takliq adalah sebagai cerai gugat.

Bagi kasus permohonan cerai talak di mahkamah dari suami dengan persetujuan isteri, pertama pihak suami, mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan, yang disertai dengan alasan. Kedua, pemeriksaan yang meliputi surat permohonan

cerai yang di mohon. Lalu para mahkamah menetapkan hari sidang. Dan ketiga, putusan.

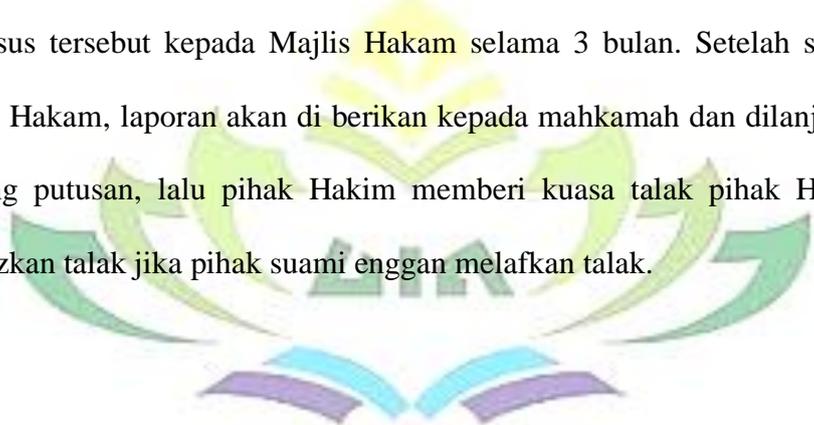
Jika pihak isteri tidak bersetuju untuk bercerai Majlis Hakim akan melantik juru damai yang diangkat dalam proses perdamaian diutamakan dari keluarga dekat yang berperkara. Kalau juru damai yang diangkat dianggap kurang mampu menjalankan tugasnya, bisa diganti dengan juru damai lain yang dianggap lebih mampu. Adapun masa usaha mendamaikan kedua belah pihak adalah selama tiga bulan. Kalau pihak suami tetap tidak mau didamaikan, pegawai yang ditunjuk harus membuat laporan ke pengadilan. Setelah itu, Hakim akan membenarkan suami untuk melafazkan cerai di depan sidang. Dan akan di failkan sahaja permohonan untuk melafazkan talaq di hadapan Hakim. Jika isteri hadir bersama suami semasa memfailkan permohonan tersebut, kes boleh terus selesai pada hari yang sama.

Manakala jika telah terjadi perceraian diluar mahkamah, maka suami atau isteri hanya perlu melapurkan ke mahkamah dan akan di beri borang (fomula) dan langsung di serahkan pada kaunter mahkamah, lalu akan diberikan tarikh persidangan, setelah suami dan isteri hadir pada hari sidang, hakim akan langsung mengeluarkan putusan cerai dengan pengakuan suami yang telah melafazkan cerai di luar mahkamah. Setelah putusan cerai di baca maka hakim akan turut membacakan denda yang dikenakan kerana melafazkan cerai diluar mahkamah.

Seterusnya kasus permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri. Proses cerai gugat lebih lama prosesnya berbanding cerai talak. Pada dasarnya mempunyai proses yang sama dengan proses perceraian talak yang tidak disetujui

pihak isteri. Yakni setelah persidangan pertama di adakan, hakim akan melantik juru damai selama 3 bulan. Sekiranya pihak suami masinh enggan menceraikan isterinya maka pihak mahkamah akan mengeluarkan surat perintah untuk suami dan isteri mengikuti mediasi di Pejabat Agama atau Pejabat Jawaan Kuasa Pendamai selama 3 bulan.

Setelah proses pendamaian selesai pihak yang berkenaan sebagai pendamai harus menyerahkan laporan kepada pihak Mahkamah, jika hasil laporan perdamaian masih tidak berhasil pihak isteri tetap nekat untuk bercerai. Mahkamah akan mengadakan sidang untuk dilanjutkan ke proses Majlis Hakam, lalu pihak suami dan isteri di perintahkan untuk hadir ke Majlis Hakam dan memberi keterangan mengenai kasus tersebut kepada Majlis Hakam selama 3 bulan. Setelah selesai proses Majlis Hakam, laporan akan di berikan kepada mahkamah dan dilanjutkan dengan sidang putusan, lalu pihak Hakim memberi kuasa talak pihak Hakam untuk melafazkan talak jika pihak suami enggan melafkan talak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan serta pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai faktor dan prosedur perceraian di PA Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan berserta dengan data-data yang penulis peroleh dari kedua pengadilan tersebut terhadap kasus perceraian, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor perceraian yang berlaku di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan, dari inisiatif perceraian di PA Tanjung Karang, lebih banyak perceraian yang diajukan dari pihak wanita dibandingkan dengan pihak lelaki. Manakala faktor utama yang menjadi musnahnya ikatan rumah tangga yang paling tinggi kasusnya adalah berlakunya perselisihan/ pertengkaran terus menerus dan permasalahan ekonomi. Di Mahkamah Syariah Kelantan hasil data mengenai faktor perceraian menunjukkan faktor tersebut di sebabkan inisiatif pihak suami. Yaitu permasalahan perceraian berlaku di sebabkan terlalu ramai pihak suami melafazkan cerai di luar pengadilan. Maka di kelantan perceraian yang tertinggi adalah cerai talak berbanding cerai gugat. Mengenai faktor punca berlakunya perceraian yang menjadi faktor utama adalah tiada persefahaman, masalah keuangan, persetujuan bercerai bersama dan isteri meninggalkan suami. Perbandingan mengenai faktor perceraian tidak berbeda, tetapi bilangan kasus perceraian yang menunjukkan perbezaan

yang amat ketara yaitu perceraian yang berlaku di MS Kelantan terlalu banyak dibandingkan dengan PA Tanjung Karang sedangkan penduduk di Tanjung Kranag Lebih ramai berbanding di Kelantan. Maka penulis berpendapat hal ini mungkin dekeranakan prosedur perceraian yang dijalankan di PA Tanjung Karang lebih dominan dibanding dengan MS Kelantan.

2. Prosedur perceraian Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan. Penulis berkesimpulan bahwa perbandingan prosedur perceraian cerai gugat dan cerai talak di PA Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan tidak terlalu berbeda dari segi tata cara pengajuan permohonan cerai, akan tetapi yang menunjukkan perbedaan antara kedua pengadilan ini adalah dari segi proses persidangan perkara. Di PA Tanjung Karang proses persidangan cerai talak lebih lama berbanding cerai gugat, yaitu persidangan cerai talak sebanyak 8 kali sidang. Manakala di MS Kelantan proses persidangan cerai talak hanya satu kali sidang, tetapi jika cerai gugat lebih lama dari cerai talak yaitu lebih kurang 4 kali sidang. Ini kerana di PA Tanjung Karang tidak mengesahkan lafaz cerai dari suami jika tidak dilakukan di pengadilan, tetapi di MS Kelantan lafaz cerai yang terjadi diluar pengadilan adalah dikiran sah walaupun tidak dilafazkan cerai di pengadilan. Selain itu, di PA Tanjuung Karang tidak ada peraturan denda bagi setaiap perceraian akan tetapi di MS Kelantan setaip kasus perceraian akan dikenakan denda jika tidak mengikutu aturan undang-undang perceraian yang di tetapkan.

Tambahan lagi, dari segi peranan hakim dalam menjalankan persidangan juga berbeda. PA Tanjung Karang telah menetapkan kewajiban kepada Hakim untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik ia cerai gugat maupun cerai talak. Akan tetapi di MS Kelantan, kewajiban hakim dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak baik cerai gugat maupun cerai talak hakim hanya diwajibkan mendamaikan kedua belah pihak pada awal persidangan saja. Malah jika Cerai talak yang telah terjadi di luar sidang Hakim tidak diwajibkan memberi usaha damai pada pasangan tersebut, tugas Hakim hanya mengesahkan perceraian dan mengeluarkan denda pada pasangan tersebut.

B. Saran Pada PA Tanjung Karang

Badan Peradilan Agama, dengan prinsip “RAHMAH” (Responsibility, Akuntabilitas, Hemat, Manfaat, Akurat, dan Harmonis) disarankan agar meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dalam menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penyuluhan hukum formal yang selama ini telah dilakukan oleh Pengadilan Agama harus tetap dijalankan secara rutin dan lebih ditekankan pada upaya mengurangi cerai talak, mengingat kasus cerai talak yang datang ke Pengadilan Agama mejangka tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Mahkamah Syariah Kelantan

Kepada Pihak Mahkamah Syariah & Pejabat Agama, Sebahagian besar perceraian atas kehendak suami berlaku di luar mahkamah. Denda RM1000 bukanlah suatu pencegahan bagi perceraian yang berlaku di luar mahkamah kerana boleh dibayar dengan mudah oleh para pesalah. Diharapkan agar pihak berkuasa agama memandangkan serius peningkatan statistik pendaftaran perceraian ini kerana ia boleh menghancurkan masyarakat kelak. Dalam usaha damai yang dijalankan tersebut, sebaiknya tidak hanya terbatas di luar sidang pengadilan saja. Meskipun tugas hakim bersifat pasif, tetapi diharapkan hakim lain yang tidak ikut dalam persidangan tersebut untuk aktif di luar pengadilan dengan bersedia menjadi alat atau mediator bagi pihak yang berperkara.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Tihami, Sohari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Andek Masnah Andek Kelawa, *Kepimpinan Wanita Dalam Islam (Kedudukannya Dalam Syariah)*, Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, 1999.
- Abduttawab Haikal, *Rahsia Perkahwinan Rasulullah SAW*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, Ed.1., Cetakan keempat.
- Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkahwinan Di Indonesia*, Bulan Bintang Jakarta, Cetakan Kedua, 1978.
- Abdul Monir Yaacob. 2015. *Kehakiman Islam dan mahkamah Syariah*. Selangor, Malaysia: Universiti Islam Malaysia
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdullah Shonhaji dkk, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, CV ASY SYIFA', Semerang.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkahwinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Undang-undang Perkahwinan*, Cetakan Ke-1, Prednada Media, Jakarta, 2006.
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Badruzzaman Siddik, *Perkembangan Peradilan Di Indonesia*, Percetakan CV. Ardi, Fakultas Syari'ah IAIN Radin Intan Lampung, 2015.
- Bagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan*, (Kota Bharu: Mahkamah Syariah, 1998).
- Cholid Narbuko, Drs. Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Cetakan Ketiga Belas, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mekar Surabaya, 2002.
- Government of Kelantan Gazette, *Warta Kerajaan Negeri Kelantan*, (Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 2004).

- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Al-Quran dan Terjemahannya*, Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd., Kuala Lumpur. 2007.
- Jainal Sakiban Al-Jauhari, *Kursus Lengkap Perkahwinan*, Ps Potensi Enterprise, Seri Kembangan Selangor Darul Ehsan, Cetakan Pertama, 2012.
- Jabatan Kehakiman Negeri Kelantan, *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Kelantan*, (Kota Bharu: Mahkamah Syariah Kota Bharu, 1992).
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- K. Wantjik saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Keenam, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Linda Firdawaty, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Pusikamla Fakultas Usuluddin, IAIN Raden Intan Lampung, Tahun 2015.
- Mohd Salleh Ahmad, *Perkahwinan Dan Perceraian Dalam Islam*, Nazrah Enterprise, Cetakan Kedua, Selangor Darul Ehsan, 2010.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Arif Rahman Hakim, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Insan Kamil, Jawa Tengah 2010. hlm. 413.
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta. Kencana, 2005.
- Mu'ammal Hamidy & Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni*, Pt Bina Ilmu, Surabaya, Jilid 3, Cetakan Pertama, 1987.
- Mardani, *Hukum Acara Pedata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Editor, Tarmizi. Ed. 1. Cet. 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkahwinan Islam*, PT Bumi Aksara Jl. Sewo Raya, Jakarta, Cetakan Kelima, 2004.
- Notis Nomor 33 Tahun 1919 (*pembagianharta benda laki bini (suami istri) Kelantan*).
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, 2006.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pt Pradnya Paramita, Jakarta, 1914.
- Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Keempat, 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 9, Bandung: Alma'arif. 1997.

Soemiyati, *Hukum Perkahwinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nombor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, 1982.

Suharsini Arti Kunto, *Prosidur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi II, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

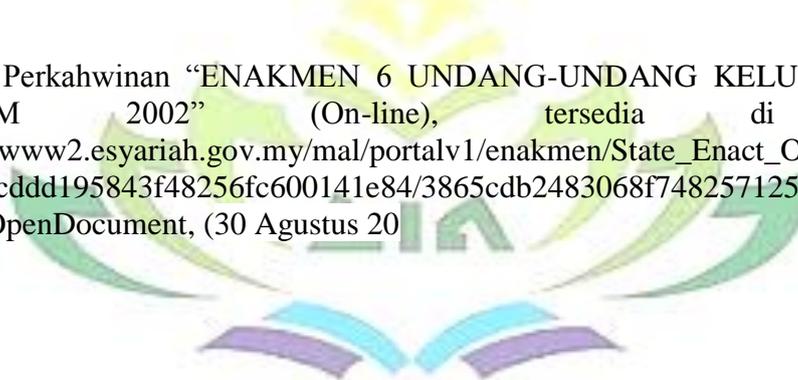
Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Cetkan 1, Cv Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-Kautsar, Jl. Cipinang Muara Raya63, Jakarta, Cetakan Keempat, 2004.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

“Malaysia” (On-line), tersedia di: [Http://Alhafiz.Net/2012/11/Cara-Perceraian-Perkahwinan-pasangan-Islam-Di-Malaysia](http://Alhafiz.Net/2012/11/Cara-Perceraian-Perkahwinan-pasangan-Islam-Di-Malaysia), (11 November 2012).

Pembubaran Perkahwinan “ENAKMEN 6 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002” (On-line), tersedia di : http://www2.esyariah.gov.my/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/3865cdb2483068f748257125002aa741?OpenDocument, (30 Agustus 20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG